



LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Kalimantan Tengah
Jl. Katamso No.11 Palangka Raya**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah agar memacu kinerja ke depan lebih produktif, profesional, efektif dan efisien dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terima kasih.

Palangka Raya, 16 Februari 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



LINAE VICTORIA ADEN, M.M. Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19680717 199903 2 006

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF SUMMARY	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi	1
1.2 Sumber Daya	4
1.3 Sarana dan prasarana	7
1.4 Tugas dan Fungsi	16
1.5 Isu Strategis	17
1.6 Cascading Kinerja	18
1.7 Cascading Dinas P3APPKB	21
1.8 Peta Proses Bisnis	27
1.9 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi	33
BAB II PERENCANAAN KINERJA	34
2.1 Rencana Strategis (Renstra) DP3APPKB Tahun 2021- 2026.....	34
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
3.1 Capaian Kinerja Instansi	38
3.2 Realisasi Anggaran	65
3.3 Capaian Kinerja Program Dan Kegiatan	79
3.4 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi/Rekomendasi	92
BAB IV PENUTUP	94
 LAMPIRAN - LAMPIRAN	
i. Form Pendanaan Indikatif pada Renstra	
ii. Perjanjian Kinerja	
iii. Rekapitulasi Data	
iv. Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD2021-2026)	
v. Keberhasilan yang Dicapai Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	
vi. Surat Reward	
vii. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2022	

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

➤ **Mekanisme Penyusunan**

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Tahun 2023 yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

➤ **Mekanisme Pengukuran**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 telah menetapkan 6 (enam) Tujuan dan 7 (tujuh) Sasaran. Ketujuh sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 11 (sebelas) indikator kinerja.

Ringkasan prestasi capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi	%
1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,92	81,98	100,07
2. Meningkatnya pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	87,5	114,28	111,57
3. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	55	55	100
4. Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	62,44	54,25	86,88
	Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2,06	2,29	89,5
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	BB	A	112,5

Ringkasan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah :

Ikhtisar pencapaian sasaran tahun 2023 sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang mendukung kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan kebijakan strategis Pemerintah Pusat yaitu Pengarusutamaan Gender (pro- gender) dan Pencegahan Stunting dan perkawinan Usia Anak dengan pendekatan keluarga. Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah didukung 10 (sepuluh) program yaitu :

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Perlindungan Perempuan
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
7. Program Perlindungan Khusus Anak

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Program Pengendalian Penduduk (PP)
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Pemanfaatan Laporan Kinerja untuk :

- Mengukur kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dalam menunjang keberhasilan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang akan datang;

- Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan.

- BAB I PENDAHULUAN

1.1. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk atas dasar Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah, maka susunan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2019, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, sebagai berikut :

1. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
2. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;

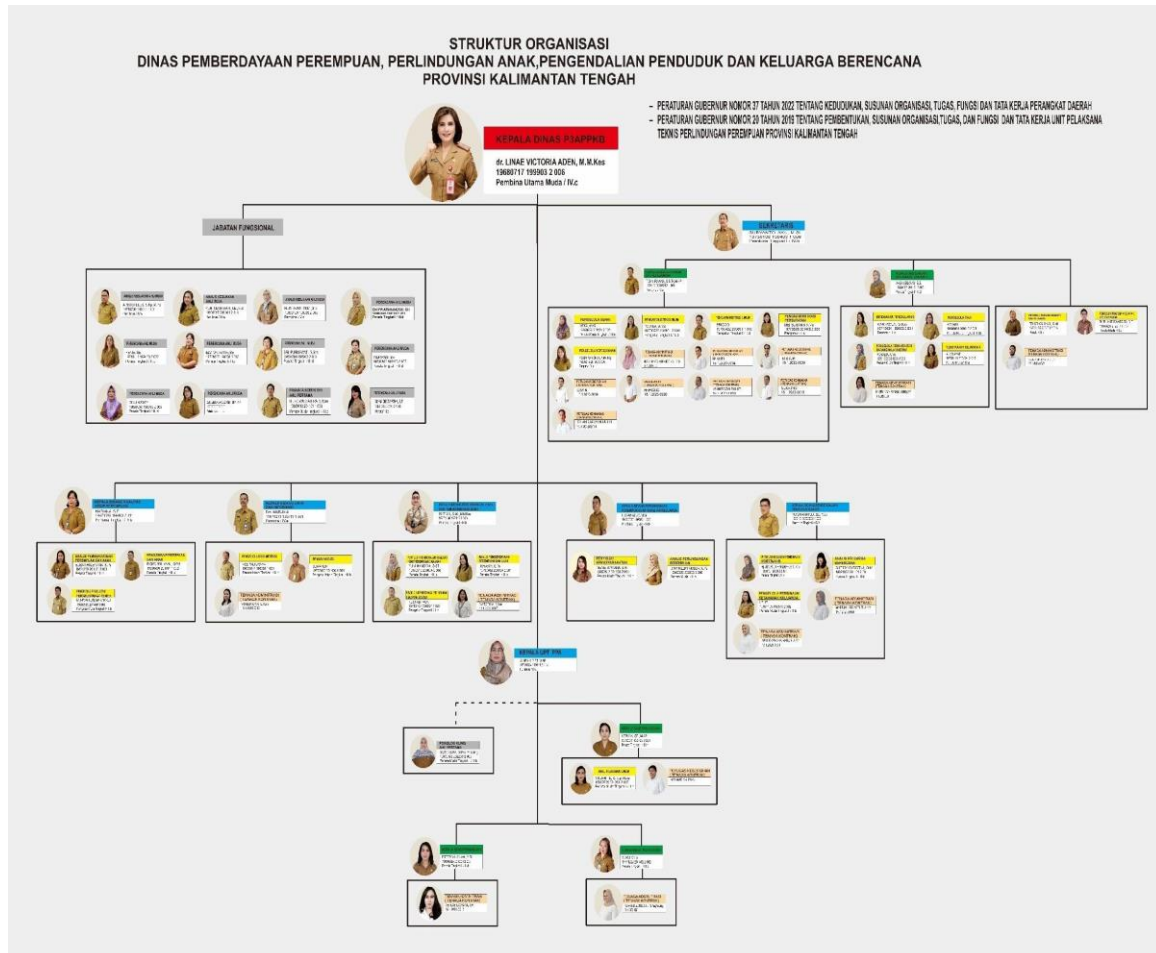
Kantor DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah beralamat di Jalan Brigjen Katamso No.11 Kota Palangka Raya.

Dalam melaksanakan 2 urusan, DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dikepalai seorang Kepala Dinas, yang membawahi Sekretariat dan 5 (lima) Bidang yaitu : (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan ; (2) Bidang Data dan Informasi (3) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; (4) Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga ; (5) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, serta Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan anak (UPT-PPA)

1.1 STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

(Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 dan 20 Tahun 2019)



Berdasarkan Struktur Organisasi di atas, dapat digambarkan bahwa :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah ;
2. Sekretaris, membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- Koordinator Sub Subtansi Penyusunan Program

3. Kepala Bidang, terdiri dari :

a) Bidang Kualitas Hidup Perempuan, membawahi :

- Koordinator Sub Subtansi Pelembagaan PUG
- Koordinator Sub Subtansi Pemberdayaan Perempuan
- Koordinator Sub Subtansi Penguatan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan.

b) Bidang Data dan Informasi, membawahi :

- Koordinator Sub Subtansi Data
- Koordinator Sub Subtansi Penyebarluasan Informasi
- Koordinator Sub Subtansi Partisipasi Masyarakat

c) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, membawahi :

- Koordinator Sub Subtansi Tumbuh Kembang Anak
- Koordinator Sub Subtansi Perlindungan Anak
- Koordinator Sub Subtansi Pemantapan Lembaga Layanan Anak

d) Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahi :

- Koordinator Sub Subtansi Perlindungan Perempuan
- Koordinator Sub Subtansi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga
- Koordinator Sub Subtansi Standarisasi Lembaga Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

e) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, membawahi :

- Sub Koordinator Sub Subtansi Pengendalian Penduduk.
- Sub Koordinator Sub Subtansi Keluarga Sejahtera
- Sub Koordinator Sub Subtansi KB

f) Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA)

- Kepala Seksi Tindak Lanjut
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- Kepala Seksi Pengaduan

g) Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2. SUMBER DAYA

Dalam rangka penyelegaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 didukung sumberdaya manusia yang diklasifikasikan kedalam komposisi pegawai menurut Jenis kepegawaian, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut golongan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenis Pendidikan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan, komposisi pegawai per desember 2021 disajikan terpisah laki-laki dan perempuan sebagai berikut :

a) Jumlah ASN/ Tenaga Kontrak

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah		Total
		L	P	
1.	PNS Daerah	15	40	55
3.	Tenaga Kontrak	6	4	10
Jumlah		21	44	65

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DINAS P3APKB Provinsi Kalteng Tahun 2022

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah		Total
		L	P	
1.	Golongan IV	6	6	12
2.	Golongan III	7	29	36
3.	Golongan II	4	3	7
4.	Golongan I	-	-	-
Jumlah		15	38	55

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DINAS P3APKB Provinsi Kalteng Tahun 2022

b) Pendidikan**Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenjang Pendidikan**

No	Jenjang	Jumlah		Total
		L	P	
1.	SDN	0	0	0
2.	SLTP	0	0	0
3.	SLTA	4	6	10
4.	D3	0	5	5
5.	S1	7	20	27
6.	S2	3	9	12
7.	S3	-	1	1
Jumlah		14	41	55

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DINAS P3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2022

Dengan melihat kondisi pada tabel tersebut di atas, berarti peningkatan jenjang pendidikan bagi PNS sudah dianggap sesuatu yang penting untuk jenjang karir. Kemudian untuk memenuhi kondisi yang sesuai dapat dilakukan pemetaan PNS dengan melakukan uji kompetensi untuk mengetahui keinginan dan kemampuan PNS berdasarkan kompetensi dan minatnya.

c) Struktur eselon / jabatan fungsional**Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional**

No	Jabatan	Eselon	Formasi	Jumlah		Total
				L	P	
1.	Kepala Dinas	Eselon II	1	-	1	1
2.	Sekretaris / Kabid/Kepala UPT	Eselon III	7	2	5	7
3.	Kasubbag / Kasi	Eselon IV	5	1	4	5
4.	Fungsional Tertentu	-	17	5	12	16
Jumlah			30	8	22	30

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DINAS P3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2022

Dari data komposisi diatas bahwa ada kekosongan karena pensiun untuk jabatan.

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah		Total	Total per Golongan
			L	P		
1.	Pembina Utama	IV/e	-	-	-	12
2.	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-	
3.	Pembina Utama Muda	IV / c	-	1	1	
4.	Pembina Tk. I	IV / b	1	2	3	
5.	Pembina	IV / a	2	6	8	
6.	Penata Tk. I	III / d	-	13	13	36
7.	Penata	III / c	3	5	8	
8.	Penata Muda Tk. I	III / b	3	10	13	
9.	Penata Muda	III / a	1	1	2	
10.	Pengatur Tk. I	II / d	2	2	4	7
11.	Pengatur	II / c	-	1	1	
12.	Pengatur Muda Tk. I	II / b	2	-	2	
13.	Pengatur muda	II / a	-	-	-	-
14.	Juru Tk. I	I / d	-	-	-	
15.	Juru	I / c	-	-	-	
16.	Juru muda TK. I	I/b	-	-	-	
17.	Juru Muda	I/a	-	-	-	
JUMLAH			15	40	55	55

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DINAS P3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2022

Komposisi jumlah PNS tahun 2023 sebanyak 55 orang, dari jumlah PNS tersebut sebagaimana tersebut pada tabel di atas, Golongan IV 12 orang, Golongan III 36 orang dan golongan II 7 orang. Adapun golongan terbanyak Golongan III sebanyak 36 orang sebesar 47,27 %. Dimana di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dalam klasifikasi pegawai berdasarkan Komposisi Pegawai (PNS Daerah).

1.3. SARANA DAN PRASARANA

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tupoksi

No	Nama Sarana/Prasarana	Merk/Type	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-		Hibah	1978	Baik	1
2	Sepeda Motor	Honda / NF 125 TD1	Besi/Plastik	Hibah	2009	Baik	1
3	Sepeda Motor	Honda / NF 125 TD1	Besi/Plastik	Hibah	2009	Baik	1
4	Lemari Besi/Metal	Brother / -	Besi	Pembelian	2009	Baik	1
5	Filing Cabinet Besi	Brother / -	Besi	Pembelian	2009	Baik	1
6	Brandkas	A3 / -	Besi	Pembelian	2009	Baik	1
7	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Lokal / -	Kayu	Pembelian	2009	Baik	1
8	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / -	Besi/Busa	Pembelian	2009	Rusak Berat	1
9	Lemari Besi/Metal	Brother / -	Besi	Pembelian	2010	Baik	1
10	Filing Cabinet Besi	Brother / -	Besi	Pembelian	2010	Baik	1
11	Personal Komputer lainnya	Intel Core i3 / -	Plastik	Pembelian	2010	Baik	1
12	Filing Cabinet Besi	Brother / -	Besi	Pembelian	2011	Baik	1
13	Meja Kerja Kayu	Lokal / -	Kayu	Pembelian	2011	Rusak Berat	1
14	Kursi Rapat	Montana / -	Besi/Busa	Pembelian	2011	Baik	2
15	Meja Kerja Pejabat Eselon V	Lokal / -	Kayu	Pembelian	2011	Baik	2
16	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Brother / -	Besi/Plastik	Pembelian	2012	Baik	1
17	Note Book	Thosiba Satellite / -	Plastik	Pembelian	2012	Baik	1
18	Kipas Angin	Maspion / Stand Fan	Besi/Plastik	Pembelian	2013	Baik	1
19	P.C Unit	Intel / Pentium 5	Besi/Plastik	Pembelian	2013	Baik	1
20	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon PIXMA / -	Plastik	Pembelian	2013	Baik	1
21	Pick Up	CHOVROLET DOUBLE CABIN / COLORADO LTZ CREW CAB 2.5 MT MY12	BESI	Pembelian	2014	Baik	1
22	Sepeda Motor	HONDA SUPRA X 125 /	BESI	Pembelian	2014	Baik	1

No	Nama Sarana/Prasarana	Merk/Type	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6	7	8
		NF125TR5 M/T					
23	Sepeda Motor	HONDA SUPRA X 125 / NF125TR5 M/T	BESI	Pembelian	2014	Baik	1
24	Sepeda Motor	HONDA / SUPRA X TD 125 TR (NF 125 TR)	BESI	Pembelian	2014	Baik	1
25	Sepeda Motor	HONDA / SUPRA X TD 125 TR (NF 125 TR)	BESI	Pembelian	2014	Baik	1
26	Sepeda Motor	HONDA / SUPRA X TD 125 TR (NF 125 TR)	BESI	Pembelian	2014	Baik	1
27	Scooter	HONDA / VARIO TECHNO PGM F1 (NC112A1CF A/T)	BESI	Pembelian	2014	Baik	1
28	Lemari Besi/Metal	Brother / 2 Pintu	Besi	Pembelian	2014	Baik	5
29	Lemari Kayu	Lokal / -	Kayu/Kaca	Pembelian	2014	Baik	1
30	Filing Cabinet Besi	Brother / 4 Laci	Besi	Pembelian	2014	Baik	7
31	Filing Cabinet Besi	Brother / 4 Laci	Besi	Pembelian	2014	Baik	1
32	Kursi Kayu	Lokal / -	Rotan/Busa	Pembelian	2014	Baik	1
33	Meja Rapat	Lokal / -	Kayu	Pembelian	2014	Baik	1
34	Kursi Rapat	Polaris / -	Besi/Busa	Pembelian	2014	Baik	59
35	Meubeleur lainnya	Lokal / -	Kayu/Kaca	Pembelian	2014	Baik	4
36	A.C. Split	LG / 2pk	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Baik	1
37	Kipas Angin	Miyako / -	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Baik	4
38	Kipas Angin	Miyako / -	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Rusak Berat	2
39	Sound System	LG / -	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Baik	1
40	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Lokal / Jam Besar	Kayu	Pembelian	2014	Baik	1
41	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Lokal / -	Kayu	Pembelian	2014	Baik	1
42	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Lokal / -	Kayu	Pembelian	2014	Baik	8
43	Meja Kerja Pejabat Eselon V	Lokal / -	Kayu	Pembelian	2014	Baik	42
44	Kursi Kerja Pejabat	Lokal / -	Kayu/Busa	Pembelian	2014	Baik	1

No	Nama Sarana/Prasarana	Merk/Type	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6	7	8
	Eselon II						
45	Layar Film/Projector	Infokus / -	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Baik	1
46	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	Krezt / Wireless	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Baik	1
47	P.C Unit	Acer Aspire / Intel Corei3	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Baik	10
48	Note Book	Asus / Intel Corei3 12"	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Baik	1
49	Note Book	Acer / Intel Corei3 11,6"	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Rusak Berat	1
50	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon PIXMA MG2570 / -	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Rusak Berat	2
51	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Brother / -	Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	3
52	Lemari Besi/Metal	Brother / 2 Pintu	Besi	Pembelian	2015	Baik	11
53	Papan Pengumuman	Lokal / -	Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	1
54	Papan Pengumuman	Lokal / Struktur Organisasi	Plastik/Besi	Pembelian	2015	Rusak Berat	1
55	Meja Resepsionis	Lokal / -	Kayu	Pembelian	2015	Baik	1
56	Lemari Es	Toshiba Glacio / -	Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	1
57	Televisi	Panasonic	Plastik/Besi	Pembelian	2015	Rusak Berat	1
58	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Lokal / -	Besi/Busa	Pembelian	2015	Baik	8
59	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / -	Besi/Busa	Pembelian	2015	Baik	3
60	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / -	Besi/Busa	Pembelian	2015	Rusak Berat	1
61	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / -	Besi/Busa	Pembelian	2015	Baik	12
62	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	Lokal / -	Plastik/Busa	Pembelian	2015	Baik	19
63	Camera Electronic	Sony / -	Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	1
64	Camera Film	Nikon / -	Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	1
65	Lap Top	Asus / -	Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	4
66	Lap Top	Asus	Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	1
67	Lap Top	Asus / -	Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	3
68	Printer (Peralatan Personal)	Pixma ix6560 / A3	Plastik/Besi	Pembelian	2015	Rusak Berat	1

No	Nama Sarana/Prasarana	Merk/Type	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6	7	8
	Komputer)						
69	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Pixma ix6560 / A3	Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	1
70	Scooter	Honda Vario / Vario 125 CBS ISS	Besi	Hibah	2016	Baik	1
71	Scooter	Honda Vario / Vario 125 CBS ISS	Besi	Hibah	2016	Baik	1
72	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	Daihatsu / Luxio 1.5 X M/T	Besi	Hibah	2016	Baik	1
73	Mesin Absensi	Finger Spot / -	Plastik/Besi	Pembelian	2016	Baik	2
74	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	Toa / -	Plastik/Besi	Pembelian	2016	Baik	2
75	Lap Top	Apple / -	Plastik/Besi	Pembelian	2016	Rusak Berat	1
76	Lap Top	Lenovo / -	Plastik/Besi	Pembelian	2016	Baik	3
77	Hard Disk	WD My Passport Ultra / -	Plastik	Pembelian	2016	Baik	3
78	Wireless	Bismarck / -	Plastik/besi	Pembelian	2018	Baik	1
79	Camera Electronic	Panasonic / -	Plastik	Pembelian	2018	Baik	1
80	Telephone Mobile	Samsung / -	Plastik	Pembelian	2018	Baik	1
81	Note Book	Apple / -	Plastik	Pembelian	2018	Baik	1
82	Hard Disk	WD / -	Plastik	Pembelian	2018	Baik	1
83	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / -	Plastik	Pembelian	2018	Baik	1
84	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / -	Plastik	Pembelian	2018	Baik	1
85	kendaraan Dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	Kijang Inova Venture / MPV	Besi	Pembelian	2019	Baik	1
86	Scooter	Honda / X1H02N35M1 A/T	Besi	Pembelian	2019	Baik	1
87	Scooter	Honda / X1H02N35M1 A/T	Besi	Pembelian	2019	Baik	1
88	Rak Besi	Lokal / -	Besi/Kayu	Pembelian	2019	Baik	3

No	Nama Sarana/Prasarana	Merk/Type	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6	7	8
89	Filing Cabinet Besi	Informa / -	Besi	Pembelian	2019	Baik	2
90	Kursi Besi/Metal	Informa / Kursi Tunggu	Besi	Pembelian	2019	Baik	2
91	Meja Rapat	Lokal / -	Kayu	Pembelian	2019	Baik	2
92	Kasur/Spring Bed	Lokal / -	Besi/Busa	Pembelian	2019	Baik	1
93	Kursi Rapat	Montana / -	Besi/Busa	Pembelian	2019	Baik	40
94	Sofa	Informa / Sofa Konsultasi	Busa	Pembelian	2019	Baik	1
95	Meubeleur lainnya	Lokal / -	Kayu	Pembelian	2019	Baik	4
96	A.C. Split	Panasonic / 2pk	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	3
97	A.C. Split	Panasonic / 0,5pk	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	2
98	A.C. Split	Panasonic / 1,5pk	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	4
99	A.C. Split	Panasonic / 2pk	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
100	A.C. Split	Panasonic / 2pk	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
101	A.C. Split	Panasonic / 1pk	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
102	A.C. Split	Panasonic / 1pk	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	3
103	Alat Pendingin lainnya	Imatsu / Air Curtain	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	3
104	Televisi	Panasonic / -	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
105	Televisi	Panasonic / -	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	3
106	Sound System	Ashly / -	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
107	Sound System	B&B / Mini	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
108	Stabilisator	Hokimotto / -	Besi	Pembelian	2019	Baik	2
109	Dispenser	Sanken / -	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
110	Dispenser	Sanken / -	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	2
111	Alat Pemadam/Portable	Lokal / -	Besi	Pembelian	2019	Baik	5
112	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Informa / -	Besi/Busa	Pembelian	2019	Baik	1
113	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Informa / -	Besi/Busa	Pembelian	2019	Baik	3
114	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	Informa / Kursi Pelayanan	Besi/Busa	Pembelian	2019	Baik	3
115	Digital Audio Taperecorder	Sony ICD-TX650 / Voice Recorder	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1

No	Nama Sarana/Prasarana	Merk/Type	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6	7	8
116	Camera Film	Canon / -	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
117	Camera Film	Canon / Mirrorless	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
118	Camera Film	Go Pro / -	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
119	Layar Film/Projector	Lokal / Layar Proyektor	Plastik	Pembelian	2019	Baik	2
120	Layar Film/Projector	BENQ MS506p / LCD	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
121	Layar Film/Projector	View Sonic m1 / LCD Portable	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
122	Layar Film/Projector	LG PH450 / LCD Short Throw	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
123	Layar Film/Projector	GP70UP / LCD Mini	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
124	Layar Film/Projector	Epson / LCD	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
125	Handy Talky (HT)	Kenwood / -	Plastik	Pembelian	2019	Baik	4
126	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	ABN Spektrum / -	Besi	Pembelian	2019	Baik	2
127	P.C Unit	Lenovo / -	Plastik	Pembelian	2019	Baik	3
128	P.C Unit	Lenovo / -	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	2
129	Lap Top	Lenovo / -	Plastik	Pembelian	2019	Baik	4
130	Lap Top	Asus / -	Plastik	Pembelian	2019	Baik	2
131	Note Book	Asus / -	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
132	Note Book	Lenovo / -	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
133	Personal Komputer lainnya	Samsung Galaxy / Tablet	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
134	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L3110	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
135	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / M200	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
136	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L3110	Plastik	Pembelian	2019	Baik	3
137	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / -	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
138	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / -	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1

No	Nama Sarana/Prasarana	Merk/Type	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6	7	8
139	Camera Film	Logitech / -	Plastik	Pembelian	2020	Baik	1
140	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / -	Plastik	Pembelian	2020	Baik	4
141	Lemari Besi/Metal	Lokal / 2 Pintu	Besi	Pembelian	2021	Baik	6
142	Lemari Kayu	Lokal / Arsip	Kayu	Pembelian	2021	Baik	2
143	Rak Besi	Lokal / -	Besi/kayu	Pembelian	2021	Baik	6
144	Meja Rapat	Lokal / -	Kayu	Pembelian	2021	Baik	1
145	Meja Resepsionis	Lokal / -	Kayu	Pembelian	2021	Baik	2
146	Kursi Lipat	Chitose / -	Besi/Busa	Pembelian	2021	Baik	150
147	Sofa	Lokal / -	Busa	Pembelian	2021	Baik	2
148	Sofa	Lokal / -	Busa	Pembelian	2021	Baik	6
149	Lemari Es	Panasonic / 2 Pintu	Plastik	Pembelian	2021	Baik	5
150	A.C. Split	Sharp / -	Plastik	Pembelian	2021	Baik	10
151	A.C. Split	Sharp / -	Plastik	Pembelian	2021	Baik	20
152	A.C. Split	Sharp / -	Plastik	Pembelian	2021	Baik	42
153	Televisi	Sharp / -	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
154	Dispenser	Sharp / -	Plastik	Pembelian	2021	Baik	7
155	Mimbar/Podium	Lokal / -	Kayu	Pembelian	2021	Baik	1
156	Gordyin/Kray	Shin-Inchi / -	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
157	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Krisbow-Generator / -	Besi	Pembelian	2021	Baik	1
158	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Lokal / -	Kayu	Pembelian	2021	Baik	1
159	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Lokal / -	Kayu	Pembelian	2021	Baik	6
160	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / -	Kayu	Pembelian	2021	Baik	18
161	Meja Kerja Pejabat Eselon V	Lokal / -	Kayu	Pembelian	2021	Baik	52
162	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Lokal / -	Besi/busa	Pembelian	2021	Baik	1
163	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Lokal / -	Besi/busa	Pembelian	2021	Baik	6
164	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / -	Besi/Busa	Pembelian	2021	Baik	16
165	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	Chitose / -	Besi/Busa	Pembelian	2021	Baik	7
166	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	Chitose / -	Besi/Busa	Pembelian	2021	Baik	45

No	Nama Sarana/Prasarana	Merk/Type	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6	7	8
167	Professional Sound System	Yamaha Audioline / -	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
168	Tripod Camera	ProGear (FotoPro) / -	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
169	Tripod Camera	ProGear (FoxPro) / -	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
170	Lighting Stand Tripod	GVM / -	Plastik	Pembelian	2021	Baik	2
171	Camera Digital	Nikon / -	Plastik	Pembelian	2021	Baik	2
172	Video Conference	Logitech / -	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
173	Alat Studio Lainnya	Hikvision / -	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
174	Alat Studio Lainnya	Epson / -	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
175	P.C Unit	HP / All in One	Plastik	Pembelian	2021	Baik	8
176	P.C Unit	Asus / Desktop	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
177	Lap Top	Dell / -	Plastik	Pembelian	2021	Baik	3
178	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / -	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
179	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / A3	Plastik	Pembelian	2021	Baik	3
180	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Beton	Pembelian	2021	Baik	1
181	Jaringan listrik lainnya	-		Pembelian	2021	Baik	1
182	Mesin Ketik Elektronik/Selektik	Brother / GX-6750	Plastik	Pembelian	2022	Baik	1
183	Lemari Besi/Metal	Brother / Lemari Besi 3 rak	Besi	Pembelian	2022	Baik	1
184	Lemari Besi/Metal	Brother / Lemari Besi 3 Rak	Besi	Pembelian	2022	Baik	1
185	Lemari Kayu	Lokal / Loker	Kayu	Pembelian	2022	Baik	2
186	Lemari Kaca	Lokal / Lemari Pakaian	Kayu-Kaca	Pembelian	2022	Baik	1
187	Lemari Kaca	Lokal / Lemari Sepatu	Kayu-Kaca	Pembelian	2022	Baik	1
188	Papan Pengumuman	Lokal / Struktur Organisasi	Plastik/Besi	Pembelian	2022	Baik	1
189	Papan Pengumuman	Lokal / whiteboard interaktif	Kayu-Plastik	Pembelian	2022	Baik	1
190	Papan Pengumuman	Lokal / Papan Pengumuman	Besi-Plastik	Pembelian	2022	Baik	1
191	Papan Pengumuman	Lokal / Papan Pengumuman	Plastik/Besi	Pembelian	2022	Baik	1

No	Nama Sarana/Prasarana	Merk/Type	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6	7	8
192	Papan Pengumuman	Lokal / Papan Pengumuman	Plastik/Besi	Pembelian	2022	Baik	1
193	Alat Studio Lainnya	P8 Outdoor	-	Pembelian	2022	Baik	1
194	Telephone Mobile	Realme / 5G	Plastik	Pembelian	2022	Baik	1
195	Telephone Mobile	Samsung Galaxy A23 / Android	Plastik	Pembelian	2022	Baik	2
196	P.C Unit	HP / All in one PC	Plastik	Pembelian	2022	Baik	5
197	Note Book	MSI CF633 / Core i7	Plastik	Pembelian	2022	Baik	1
198	Note Book	MSI Pulse / Core i9	Plastik	Pembelian	2022	Baik	2
199	Tablet PC	Samsung Galaxy / Android Tab S6	Plastik	Pembelian	2022	Baik	1
200	Hard Disk	Seagate / One Touch 1 T	Plastik	Pembelian	2022	Baik	5
201	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Epson / Workforce ES-50 Portable	Plastik	Pembelian	2022	Baik	1
202	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / Laserjet	Plastik	Pembelian	2022	Baik	1
203	Peralatan Personal Komputer lainnya	Inforce / Uninterruptible Power Supply (UPS)	Plastik	Pembelian	2022	Baik	4
204	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	-	Beton	Pembelian	2022	Baik	1
205	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	-	Beton	Pembelian	2022	Baik	1
206	Meja Komputer	Lokal / -	Kayu	Pembelian	2011	Rusak Berat	1

Sumber Data : Subag Keuangan dan Aset DP3APPKB Provinsi Kalteng

1.4. TUGAS DAN FUNGSI

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan

- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.5. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah dimasa yang akan datang. Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, dapat dirangkum sebagai berikut :

- a) Peningkatan Kesetaraan Gender (gender equality) di Provinsi Kalimantan Tengah
- b) Internalisasi dan Penguatan Aksi Pemenuhan Hak Anak Lintas Sektor dan di seluruh level pemerintahan sebagai upaya percepatan pencapaian 5 klaster dan 24 Indikator Kabupaten/Kota layak Anak baik itu Pemenuhan dan perlindungan Hak Anak
- c) Pencegahan dan Penanganan terhadap Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui Pelibatan Peran serta Masyarakat
- d) Pencegahan dan Pendampingan/Advokasi terhadap Tindakan Perdagangan Orang (TPPO) secara Berkelanjutan
- e) Edukasi berbasis Masyarakat untuk Pencegahan Stunting dengan pendekatan Keluarga
- f) Edukasi berbasis Masyarakat untuk Pencegahan pernikahan Pada Usia Anak
- g) Upaya Strategis Penguatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen

dan Lembaga Publik Lainnya

- h) Pengakuan dan Peningkatan Kapasitas Perempuan pelaku Ekonomi Sektor Informal terutama Pelaku Pemula Industri Rumahan dengan Pendekatan Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak

1.6. CASCADING KINERJA

Cascading Kinerja ini untuk memberikan gambaran keterhubungan antara RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dengan Renstra DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, serta tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas sebagai jabaran dari visi, misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2021 s.d 2026 dan strategi bagi pejabat eselon yang ada dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Keterkaitan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 -2026 dengan Renstra Tahun 2021-2026 DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang ingin diwujudkan pada periode 2021 -2026 adalah :

VISI :

“Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”

MISI :

- 1). *Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan;*
- 2). *Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global;*

- 3). *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi;*
- 4). *Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing;*
- 5). *Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender.*

Mengacu pada **Misi Keempat** yaitu “**Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing**” dan **Misi Kelima** yaitu “**Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender**”.

Pokok Misi keempat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan akses layanan Pendidikan secara merata, berkualitas, dan berkeadilan melalui tunjangan beasiswa untuk warga kurang mampu, termasuk pengiriman putra putri daerah berprestasi untuk kuliah keluar daerah Kalteng hingga Luar Negeri;
- 2) Menyediakan layanan Pendidikan khusus untuk wilayah terpencil, terbelakang, atau di daerah perbatasan dengan penempatan tenaga pendidik yang berkompeten disertai jaminan kesejahteraan dan peningkatan sarana maupun prasarana Pendidikan yang memadai;
- 3) Mengembangkan Pendidikan vokasi tingkat menengah dan tinggi sesuai kebutuhan di dunia kerja agar produktif dan berdaya saing tinggi;
- 4) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan, biaya gratis bagi pasien kurang mampu dan pengadaan kuantitas maupun kualitas fasilitas kesehatan beserta pengiriman dokter-dokter ke pelosok desa;
- 5) Memperkuat daya saing pemuda dan pelatihan olahragawan potensial melalui
- 6) Peningkatan fasilitas yang memadai agar dapat berkompetensi dalam skala nasional maupun internasional.

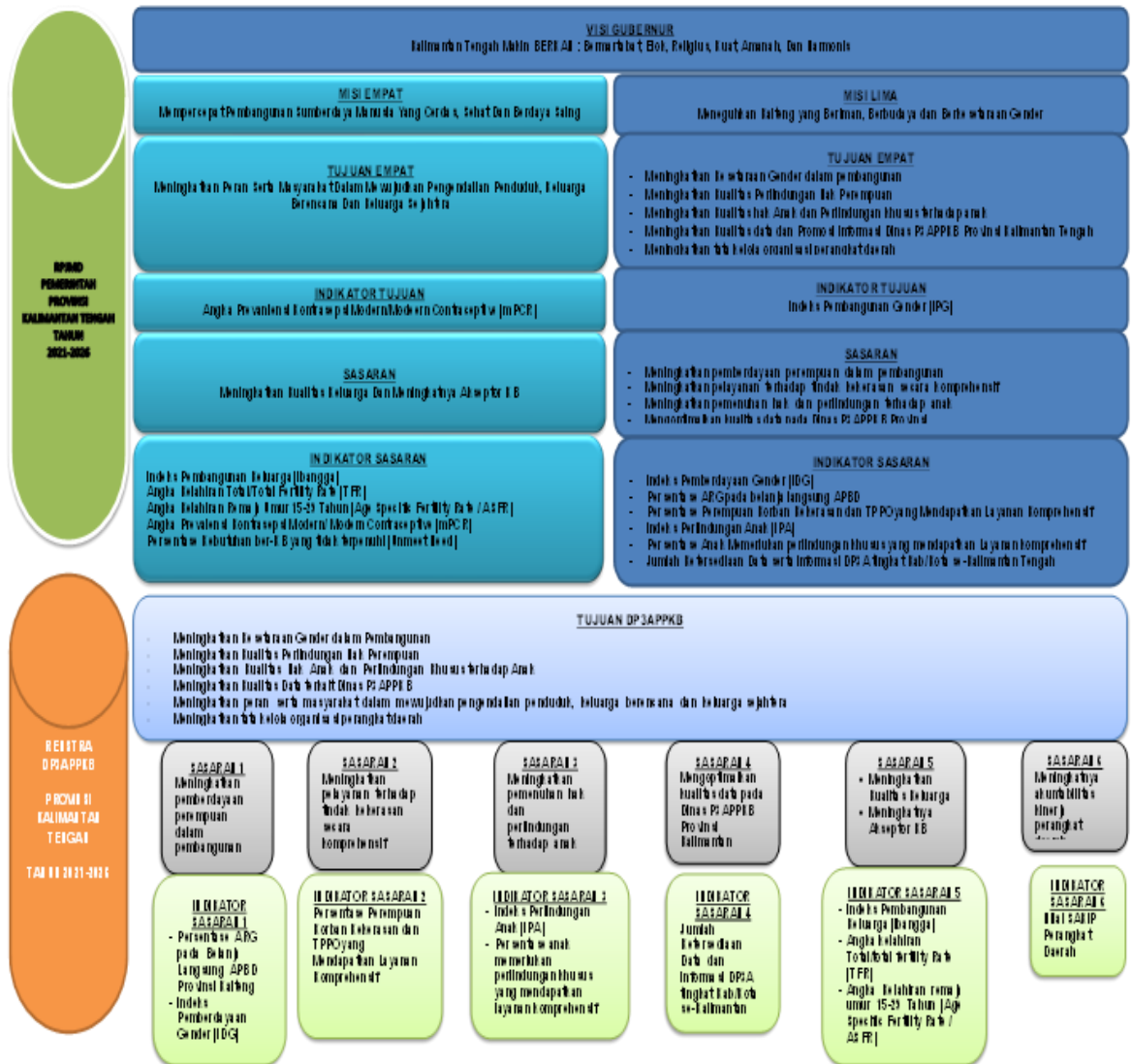
Pokok Misi Kelima, dirumuskan sebagai berikut :

- 1). Memperkuat partisipasi tokoh-tokoh lintas agama dan budaya sebagai simpul peradaban umat majemuk dan cinta damai yang berakar pada kearifan lokal falsafah Huma Betang (Rumah Besar);
- 2). Mengembangkan pesantren dan institusi keagamaan lainnya sebagai garda terdepan dalam pembentukan insan Kalteng yang beriman, pancasilais dan cinta damai;
- 3). Menciptakan pemuda yang berkompeten, berakhlakul karimah, berjiwa wirausaha dan berkebudayaan, serta berwawasan gender;
- 4). Memperluas partisipasi perempuan sebagai pejabat publik yang berorientasi kesetaraan gender;
- 5). Mencegah bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan serta anak dari berbagai kekerasan.

3.4 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan Misi Keempat dan Misi Kelima dimana Keterkaitan antara tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dengan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih akan dipaparkan secara mendetail. Menelaah Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

1.7. CASECADING DP3APPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Casacading yang menampilkan komitmen Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan Visi dan Misi Renstra pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah sesuai tahun 2021 – 2026.



Gambar 1.1 Casacading DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

CASECADING SASARAN

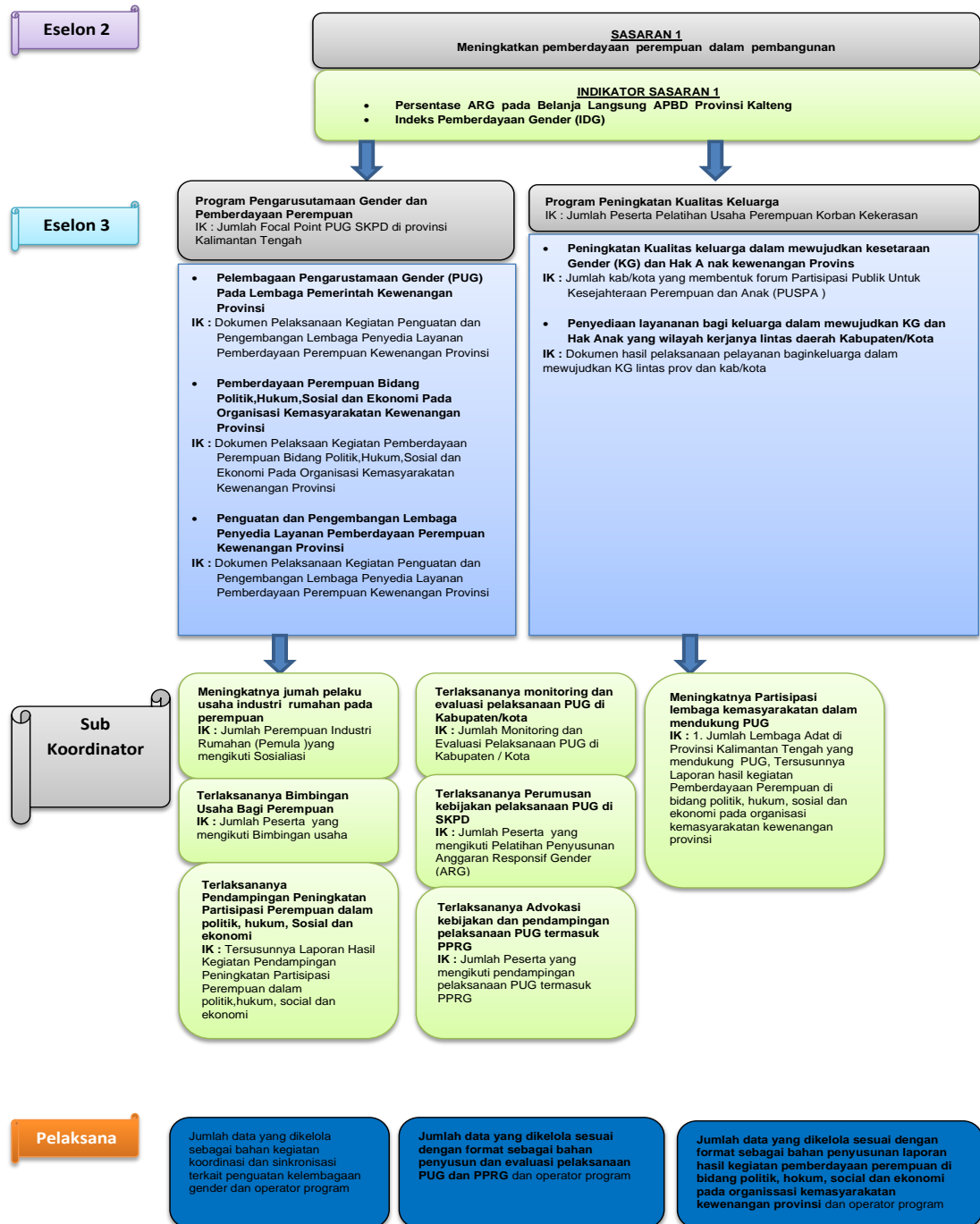
Cascading Sasaran DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang menampilkan turunan dari 6 (enam) sasaran, indikator sasaran dan program yang mendukung.



Gambar 1.2 Cascading sasaran

CASCADING KINERJA PER SASARAN

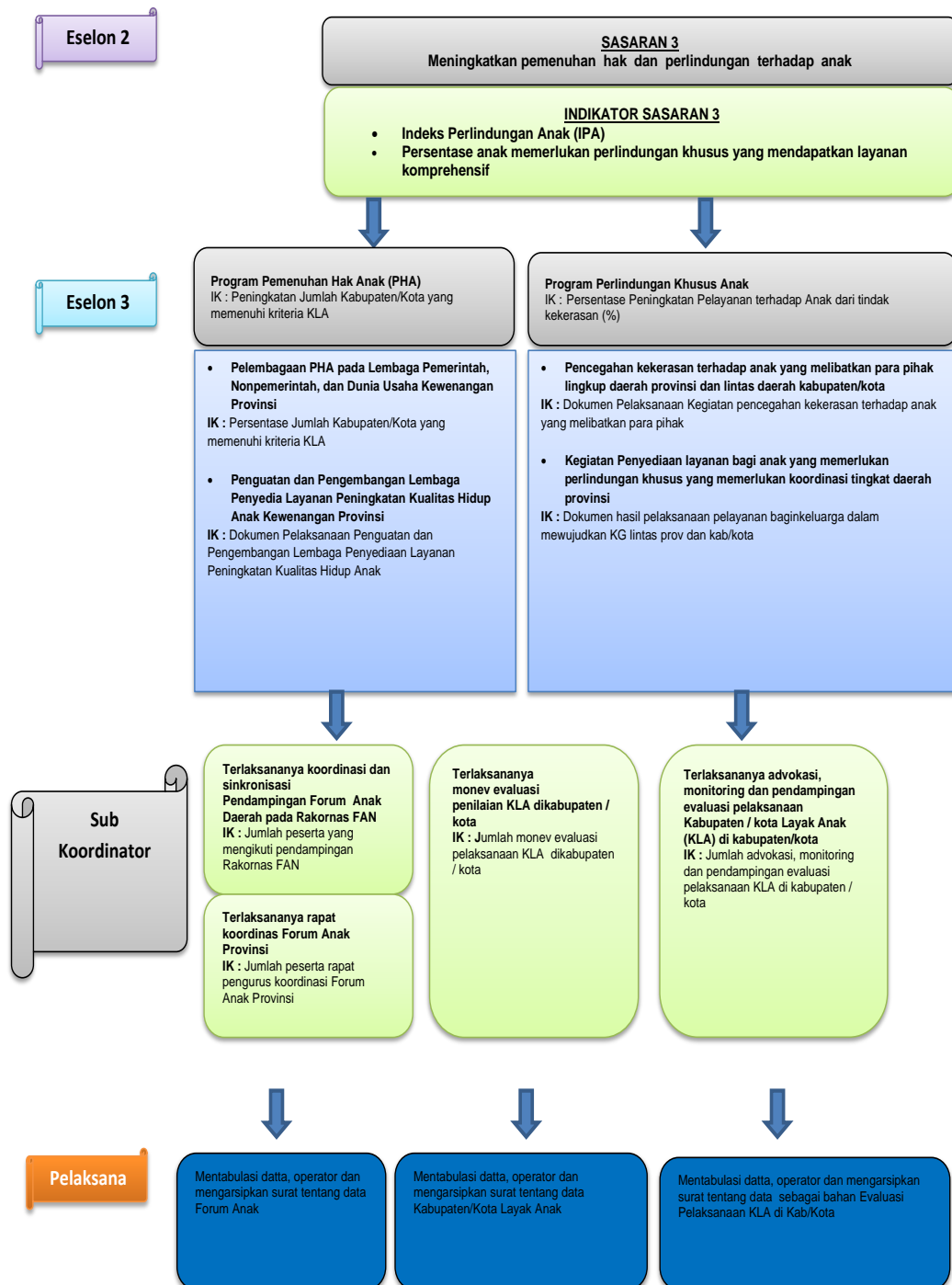
Cascading kinerja per sasaran Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, yang menampilkan proses kinerja dari Eselon 2, Eselon 3, Sub koordinator dan Pelaksana.



Gambar 1.3 Cascading kinerja per sasaran

Casecading kinerja persasaran

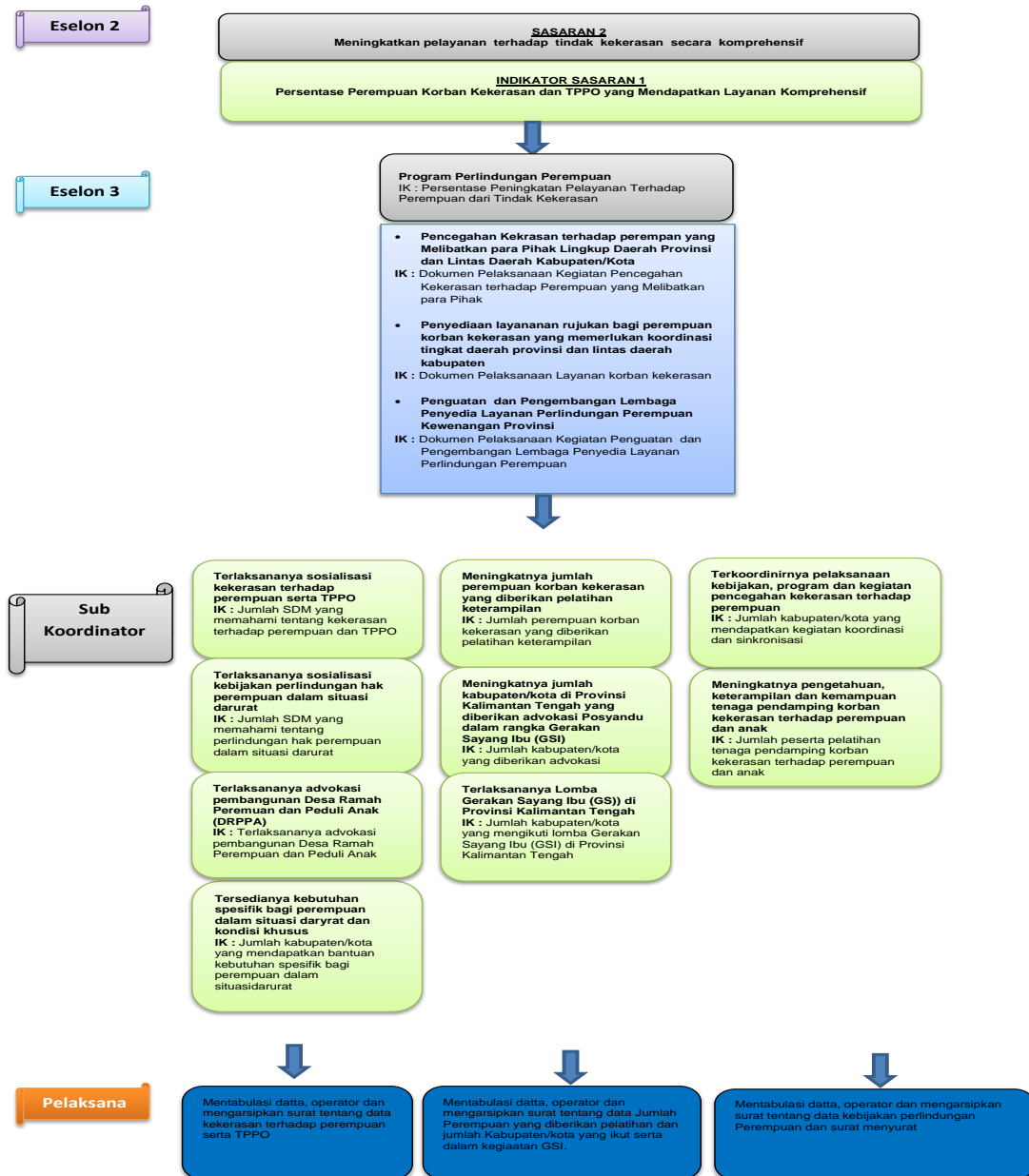
Casecading kinerja per sasaran Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, yang menampilkan proses kinerja dari Eselon 2, Eselon 3, Sub koordinator dan Pelaksana.



Gambar 1.4 Casecading kinerja per sasaran

Casecading kinerja persasaran

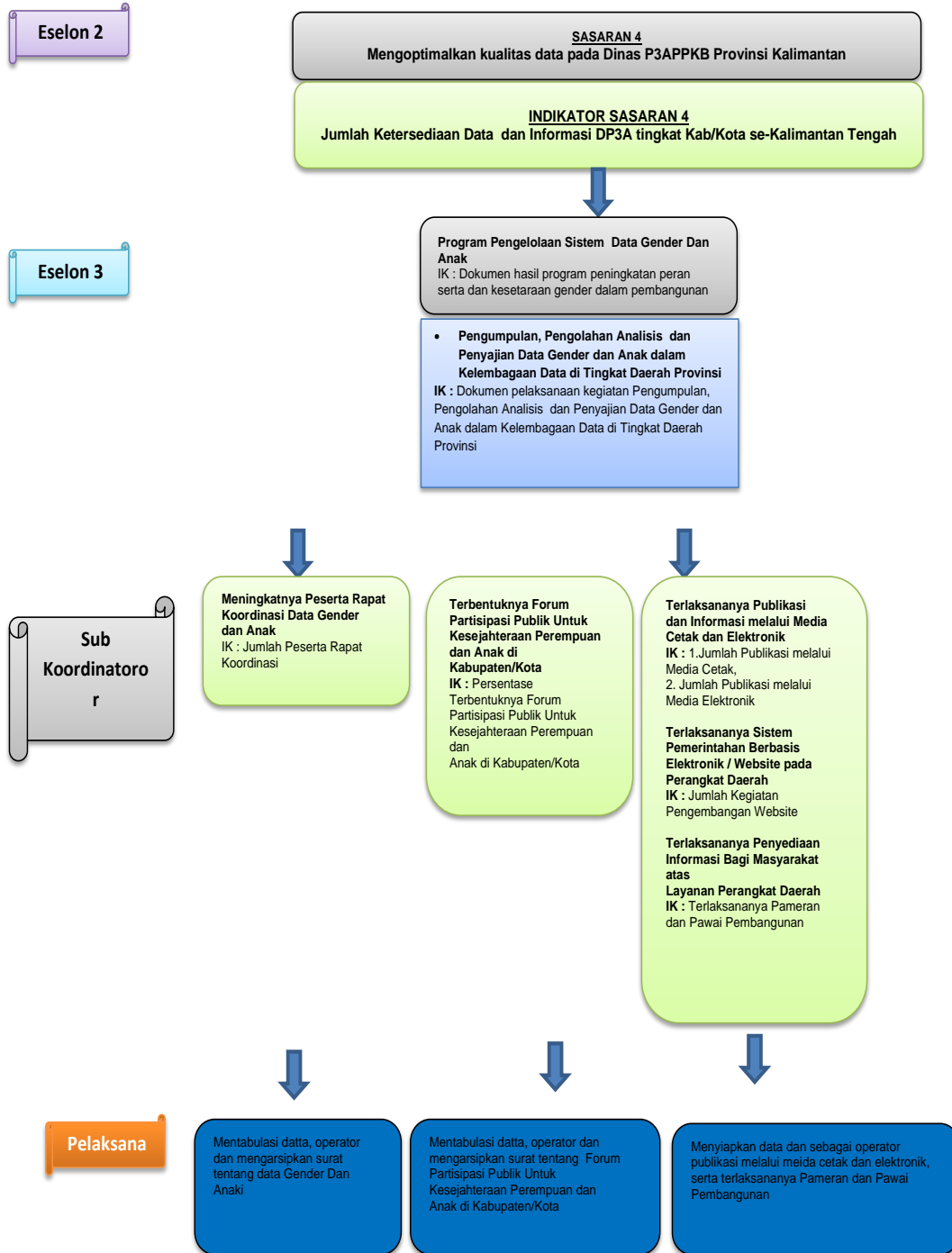
Casecading kinerja per sasaran Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, yang menampilkan proses kinerja dari Eselon 2, Eselon 3, Sub koordinator dan Pelaksana.



Gambar 1.5 Casecading kinerja per sasaran

Casecading kinerja persasaran

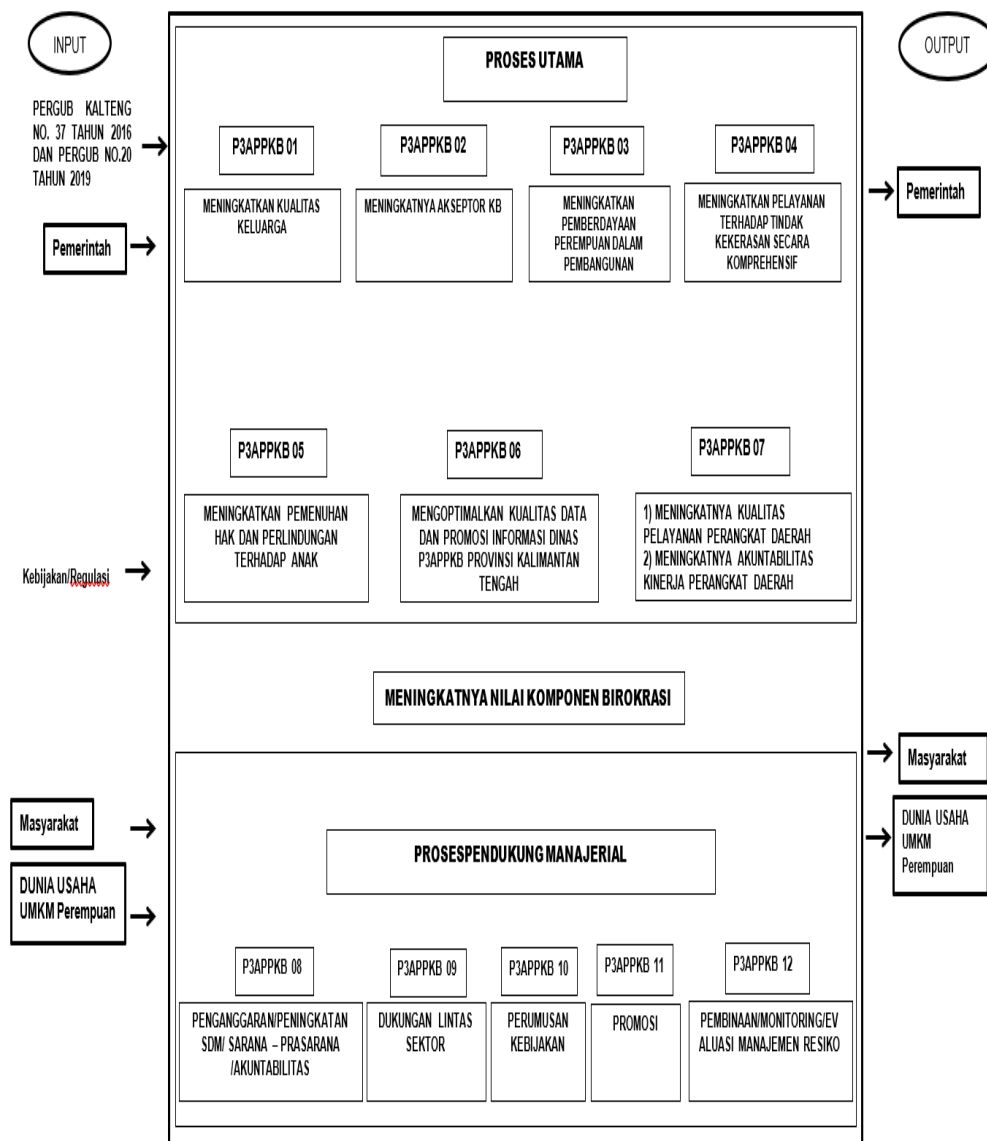
Casecading kinerja per sasaran Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, yang menampilkan proses kinerja dari Eselon 2, Eselon 3, Sub koordinator dan Pelaksana.



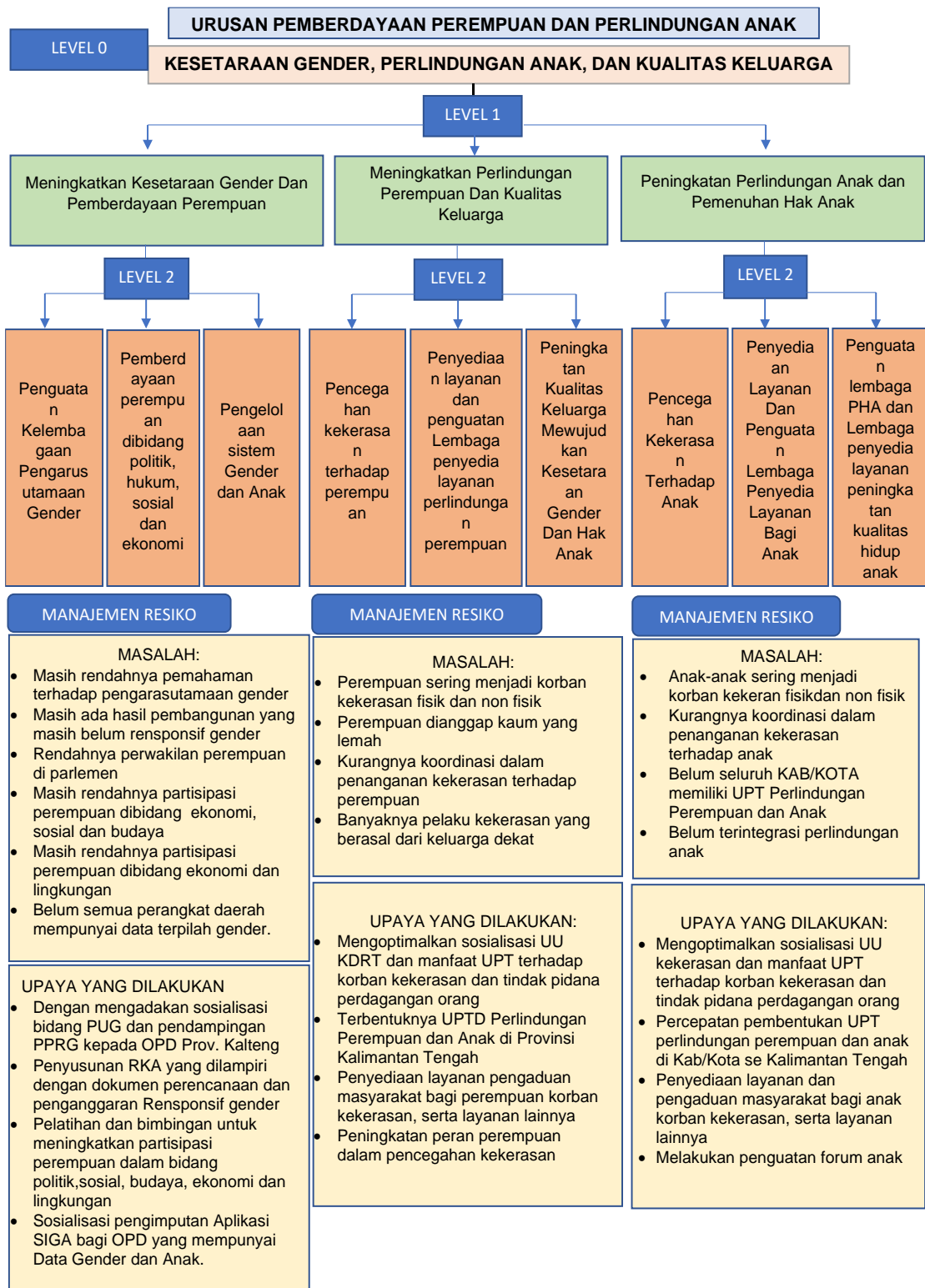
Gambar 1.6 Casecading Kinerja Persasaran

1.8 PETA PROSES BISNIS

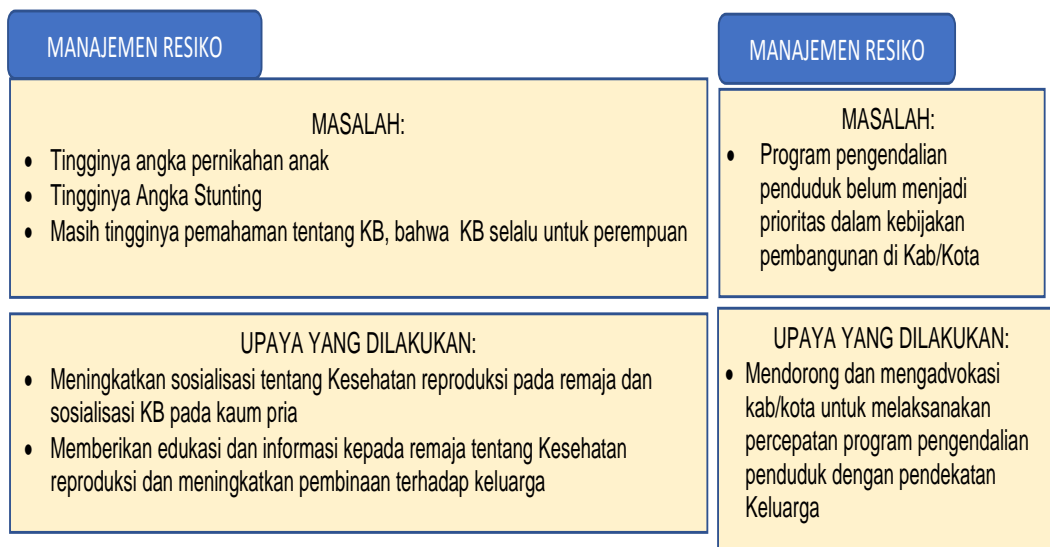
Untuk menjalankan fungsi DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam menangani 2 (dua) urusan pemerintahan, diperlukan pemetaan proses bisnis, sehingga tujuan dapat dicapai. Adapun proses bisnis Utama dalam melihat Input dan output sebagai berikut :



Gambar 1.7 Peta Proses Bisnis



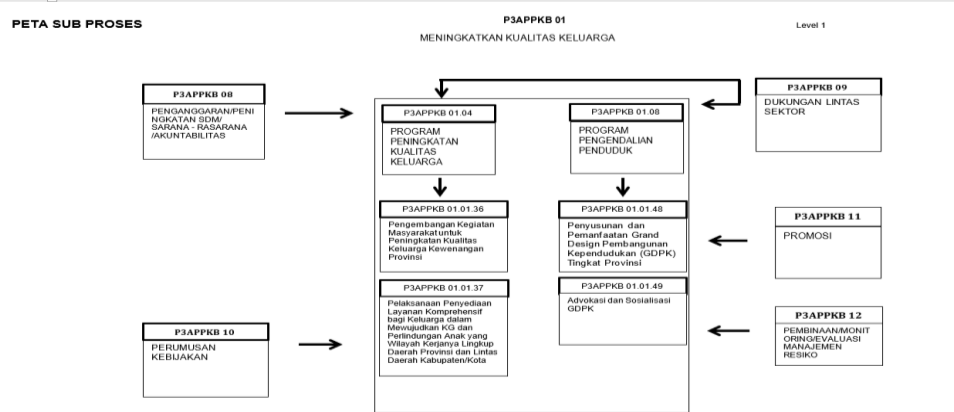
Gambar 1.8 Peta Proses Bisnis



Gambar 1.9 Peta Proses Bisnis

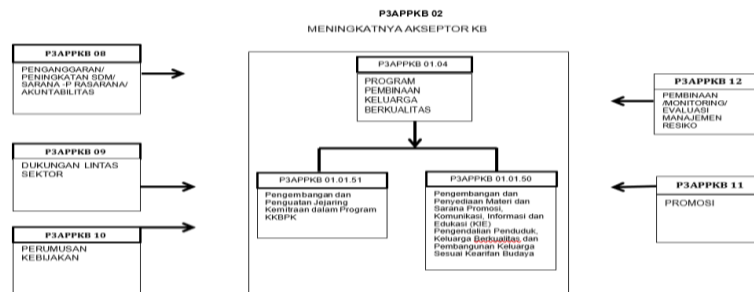
Adapun Peta Proses Bisnis di bagi dalam 7 (tujuh) Tujuan Peta Sub Proses dalam mencapai Kegiatan di Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Keluarga



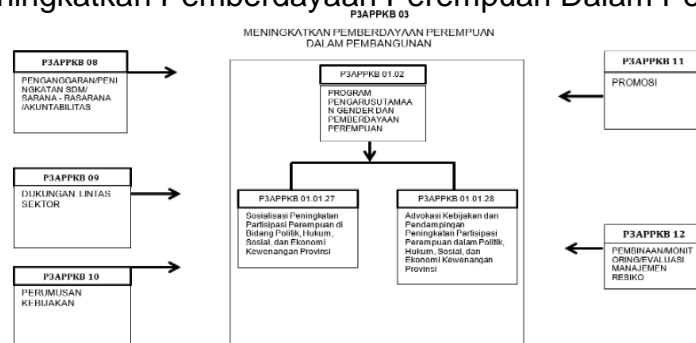
Gambar 1.10 Meningkatnya Kualitas Keluarga

2. Meningkatnya Akseptor KB



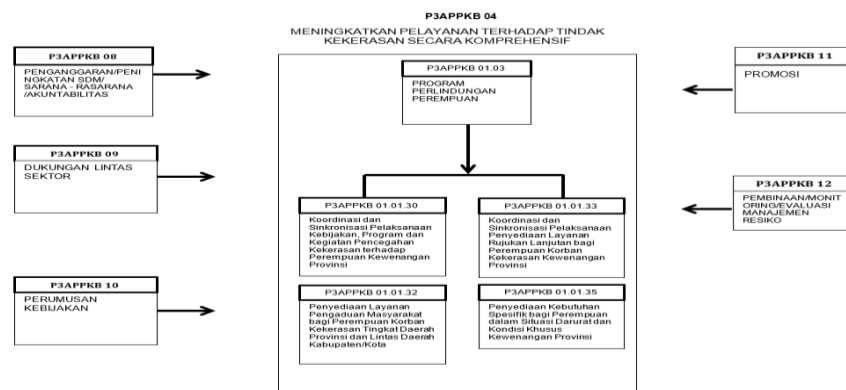
Gambar 1.11 Meningkatnya Akseptor KB

3. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan



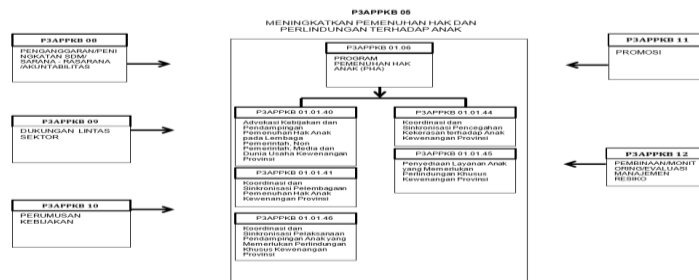
Gambar 1.12 Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan

4. Meningkatkan Pelayanan Terhadap Tindak Kekerasan Secara Komprehensif



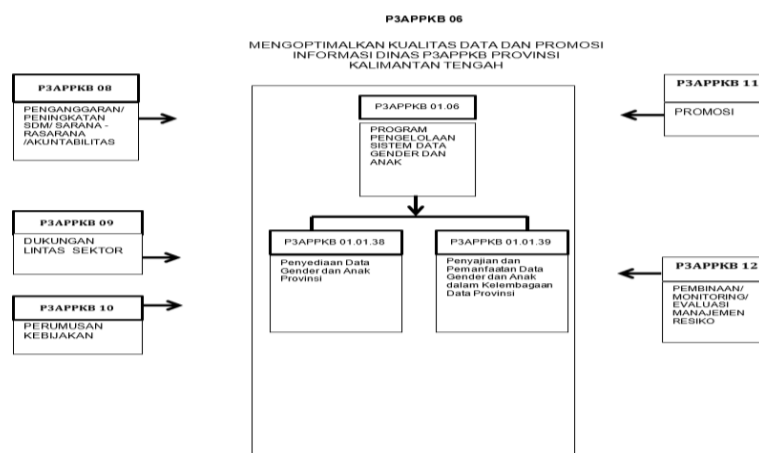
Gambar 1.13 meningkatkan Pelayanan Terhadap Tindak Kekerasan Secara Komprehensif

5. Meningkatkan Pemenuhan Hak Dan perlindungan Terhadap Anak



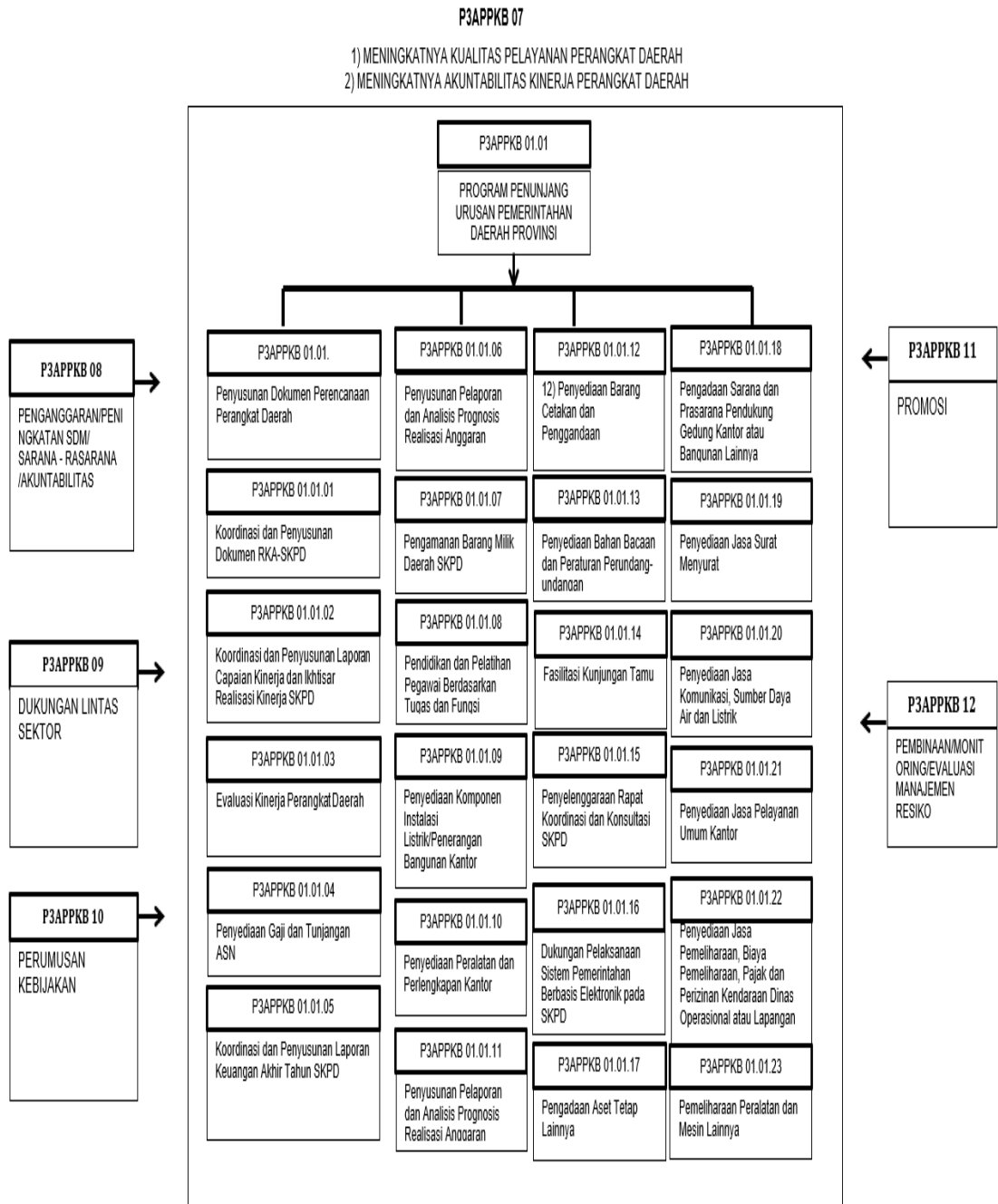
Gambar 1.14 Meningkatkan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Terhadap Anak

6. Mengoptimalkan Kualitas Data Dan Promosi Informasi DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar 1.15 Mengoptimalkan Kualitas Data dan Promosi Informasi DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

7. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah



Gambar 1.16 Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

1.8. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan dari Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DP3AKPPKB yang dilakukan oleh Tim Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, maka dapat disimpulkan hasil sebagai berikut :

1. Secara umum DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja;
2. Penyusunan dokumen perencanaan telah dijabarkan ke berbagai sasaran dan indikator kinerja keseluruhan ASN di semua level. Hal yang perlu diperhatikan adalah ketercukupan ukuran keberhasilan yang mengindikasikan tercapainya kinerja;
3. Belum sepenuhnya dilakukan monitoring dan evaluasi atas Perjanjian Kinerja yang telah disusun;
4. Implementasi Akuntabilitas Kinerja salah satu budaya kinerja masih bersifat parsial dan belum dilaksanakan secara merata pada seluruh instansi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 tertuang dalam Renstra tahun 2021-2026. Perjanjian Kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 yang telah disusun dalam rentang waktu 1 (satu) tahun bertujuan untuk mewujudkan kinerja Output maupun Outcome, serta untuk mewujudkan manajemen pemerintahan efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil. Perjanjian Kinerja DP3PPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Tahun 2023 dan melaporkannya dalam LAKIP, sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DP3APPKB TAHUN 2021- 2026

Pada Tahun 2022, DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan 6 (enam) Tujuan dan 7 (tujuh) Sasaran, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Adapun Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra DP3APPKB Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,07	89,09	89,11	89,13	89,15
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,90	81,92	81,94	81,96	81,98
	Persentase ARG pada belanja	3,43 %		3,50 %	3,60 %	3,70 %	4,00 %		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4		5	6	7	8	9
				langsung APBD					
2	Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan								
		Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	85 %	87,5 %	90 %	92,5 %	95 %
3	Meningkatkan Kualitas hak Anak dan Perlindungan khusus terhadap anak								
		Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	61,83	63,68	65,59	67,55	69,57
				Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %
		Meningkatkan Kualitas data gender dan anak							
		Mengoptimalkan kualitas data gender dan anak		Jumlah Ketersediaan Data Gender dan Anak pada DP3A tingkat Kab/Kota se-Kalimantan Tengah	6 Kab/Kota	8 Kab/Kota	10 Kab/Kota	12 Kab/Kota	14 Kab/Kota
4	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mPCR)		73,23	73,68	74,26	74,26	74,26
		Meningkatkan kualitas keluarga		Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	60,32	62,44	64,55	64,55	64,55

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke-					
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	
				Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2,10	2,06	2,00	1,96	1,96	
				Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	21	20	18	16	16	
				Meningkatnya akseptor KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mPCR)	73,23	73,68	74,26	74,26	74,26
					Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	5,36 %	5,18 %	5 %	5,01 %	5,01 %
5	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat		70	74	77	80	85	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Untuk menunjang pencapaian 5 (lima) Sasaran Strategis Tahun 2023 didukung dengan pagu anggaran APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 17.629.701.744,-. Adapun Perjanjian Kinerja serta Program dan Kegiatan Tahun 2023 yang mendukung tercapainya sasaran Renja dan Renstra DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,92 Indeks	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.074.393.501,-
2. Meningkatnya pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	87,5 %	Program Perlindungan Perempuan	1.029.521.131,-
3. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	55 %	Program Perlindungan Khusus Anak	589.622.435,-
4. Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	62,44 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.473.155.100,-
	Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2,06	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	36.339.945,-
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	BB Skor	Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	12.272.169.181,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah adalah bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja tujuan dan sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

Tingkat Realisasi Positif :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tingkat Realisasi Negatif :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk kategori capaian digunakan sebagai berikut :

Rentang Capaian	Kategori Capaian
Lebih dari 100%	Sangat Baik
75% sampai dengan 100%	Baik
55% sampai 75 %	Cukup
Kurang dari 55%	Kurang

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan dan sasaran strategis tersebut, dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Tujuan 1 :
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan

Keberhasilan pencapaian Tujuan ini diukur melalui indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2023

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,92	81,98	100.07

Catatan : *) Realisasi IDG tahun 2023 adalah Data Tahun 2022

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)** Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 81,92 dan realisasi capaian tahun 2023 sebesar 81,98 tingkat capaian sebesar 100,07 %. Dimana capaian hasil kesetaraan gender dan pemberdayaan di Kalimantan Tengah sudah berhasil . Seluruh kegiatan dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai perencanaan, sesuai regulasi, efektif dan efisien sehingga menghasilkan nilai capaian aoutput 100,07 % pada tahun 2023.

Dampak/ Outcome dalam keberhasilan IDG di Kalimantan Tengah dimana pembangunan memiliki kesetaraan yang harus diwujudkan bersama dimana pemberdayaan perempuan dan kontribusi pembangunan kepada perempuan

sudah berjalan selaras.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) didukung dari 3 (tiga) komponen, yaitu :

1. Keterlibatan perempuan dalam parlemen
2. Perempuan sebagai tenaga profesional
3. Sumbangan pendapatan perempuan

Capaian terhadap masing-masing komponen IDG menunjukkan adanya upaya dalam pembangunan yang responsif gender yang bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender sesuai amanah SDGs dan RPJMN 2019-2024 serta RPJMD 2021-2026 Provinsi Kalimantan Tengah yaitu terwujudnya Kesetaraan Gender, melalui kemudahan AKSES perempuan dalam segala bidang pembangunan; memberikan kesempatan bersuara atau PARTISIPASI; memudahkan untuk dapat bagian dalam ikut mengambil keputusan atau KONTROL pembangunan serta menerima hasil atau MANFAAT pembangunan yang dilihat melalui indikator-indikator komponen pendukung IDG tersebut.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,92	81,241	82,08	81,98

Realisasi IDG di Kalimantan Tengah pada tahun 2021 sebesar 82,41. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi IDG sebesar 82,08, dan pada tahun 2023 capaiannya 81,98 menurun 1,9 poin dibandingkan dengan IDG Tahun 2022.

Tabel Komponen Pendukung IDG Kalimantan Tengah

Tahun	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
1	2	3	4	5
2020	35,56	43,35	33,40	83,20
2021	33,33	46,12	33,63	82,41
2022	33,33	47,36	33,48	82,08
2023	33,33	43,80	33,37	81,98

Berdasarkan capaian dalam tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa :

1. Keterlibatan perempuan di parlemen pada tahun 2020 sebesar 35,56%. Komponen ini mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 33,33 %. Komponen keterlibatan perempuan di parlemen di Kalimantan Tengah pada tahun 2021 tetap dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 33,33% sampai tahun 2023. Komponen perempuan di parlemen di Kalimantan Tengah lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasional yaitu sebesar 21,74%.
2. Perempuan sebagai Tenaga Profesional, pada tahun 2020 sebesar 43,35% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 46,12%. Komponen ini mengalami kenaikan sebesar 7,23 poin, jika dibandingkan tahun 2021 Komponen perempuan sebagai tenaga profesional di Kalimantan Tengah meningkat yaitu sebesar 47,36%, meningkat 1,24 point. Pada tahun 2023 43,80 menurun menjadi 3,56 poit. Komponen perempuan sebagai tenaga profesional di Kalimantan Tengah lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional yaitu sebesar 48,65%.
3. Sumbangan Pendapatan Perempuan, pada tahun 2020 sebesar 33,40% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 33,63%. Komponen ini mengalami peningkatan sebesar 0,23 poin jika dibandingkan tahun 2020, Tahun 2021 mengalami penurunan 33,48% sebesar 85 poit. Pada tahun 2023 33,37 menurun dari tahun 2022 11 poit Komponen Sumbangan pendapatan perempuan di Kalimantan Tengah lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional yaitu sebesar 37,17%.

Menurut penjelasan komponen IDG dapat disimpulkan bahwa adanya penurunan kinerja pada 1 (satu) komponen IDG, yaitu Sumbangan Pendapatan Perempuan yang dikarenakan pada tahun 2022 masih terjadi pandemic covid -19 yang mempengaruhi kondisi ekonomi secara makro juga mempengaruhi turunnya sumbangan pendapatan perempuan dikarenakan banyak terjadinya PHK.

Berikut ini adalah Capaian IDG dan komponennya menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah. Dimana masing-masing bervariasi bahkan ada Kabupaten/Kota yang capaiannya lebih tinggi dibandingkan provinsi. Capaian IDG ini tidak bersifat kumulatif dari Kabupaten/Kota. Sehingga capaian Kabupaten/Kota tidak bisa mendorong capaian provinsi.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponennya Tahun 2023

No	Kab/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
1	Kotawaringin Barat	16,67	45,63	23,81	63,00
2	Kotawaringin Timur	22,50	31,24	25,95	67,38
3	Kapuas	27,50	44,14	27,33	73,35
4	Barito Selatan	40,00	52,47	37,97	86,34
5	Barito Utara	36,00	46,06	43,93	87,10
6	Sukamara	25,00	53,76	21,36	67,33
7	Lamandau	20,00	40,67	27,42	69,98
8	Seruyan	12,00	37,92	27,69	62,16
9	Katingan	16,00	41,15	29,63	66,80
10	Pulang Pisau	28,00	40,10	22,48	69,68
11	Gunung Mas	48,00	50,59	49,43	89,15
12	Barito Timur	28,00	55,17	44,12	82,56
13	Murung Raya	16,00	46,52	28,68	67,48
14	Palangka Raya	33,33	45,23	32,43	80,48
Kalimantan Tengah		33,33	43,80	33,37	81,98
Indonesia		21,74	48,65	37,17	76,27

Sumber Data: DP3APPKB Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi Kalimantan Tengah	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,98	76,27	+ 5,71

Pada Tahun 2023, angka IDG Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 82,08 lebih tinggi 5,82 poin dari angka IDG Nasional sebesar 76,26. Hal ini dikarenakan dari komponen keterlibatan perempuan di parlemen Kalimantan Tengah 33,33 dan lebih tinggi dari nasional sebesar 21,89 dan komponen perempuan sebagai tenaga profesional sebesar 47,37% lebih rendah dari nasional sebesar 49,99 dan sumbangan pendapatan perempuan Kalteng sebesar 33,48 lebih rendah dari nasional sebesar 37,2.

Dimana Kalimantan Tengah berdasarkan data tahun 2023 81,98 masuk kategori sangat tinggi. Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. BPS kemudian merumuskan hasil analisisnya ke dalam skor 0-100 poin, dengan kategori penilaian sebagai berikut:

- Rendah : IDG < 50
- Sedang : 50 ≤ IDG < 60
- Tinggi : 60 ≤ IDG ≤ 80
- Sangat tinggi: IDG > 80

Anggaran tersedia pada dana APBD 2023 program Pengarustamaan gender dan Pemberdayaan perempuan berjumlah 1.074.393.501 terealisasi berjumlah 724.393.501 (67,42 %) efisiensi anggaran berjumlah 367.252.933 (34,2 %). Dengan Kerjasama Tim Bidang teknis dan Kerjasama semua ASN DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencapaian keberhasilan bersama.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja IDG merupakan upaya yang

saling terkait dan saling terintegrasi antara pemerintah (eksekutif) Dinas P3APPKB Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Dinas terkait, perlemen (legislatif), maupun yudikatif dan semua komponen jejaring lembaga masyarakat, swasta dan lainnya serta peran serta masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Pelayanan terhadap tindak kekerasan secara Komprehensif

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 1 (satu) diukur melalui indikator Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif, adapun capaian :

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2022 - 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan Komprehensif	85	85	100	87,5	114,28	111,57

Dapat dilihat dari capaian persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif pada tahun 2022 sebesar 100 % dan pada tahun 2023 mencapai target 111,57 % melebihi dari target. Dimana dengan adanya layanan yang ada di UPT PPA Provinsi Kalimantan Tengah memberikan layanan GRATIS sampai selesai untuk korban kekerasan pada Perempuan dan TPPO di Kalimantan Tengah. Dan ini keberhasilan Promosi yang gencar melalui media cetak, elektronik dan dengan adanya UPTD di Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Kalimantan Tengah sehingga masyarakat mulai tidak malu untuk datang ke tempat pelayanan yang disediakan Pemerintah.

Data Capaian Layanan Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan Komprehensif di Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah tahun 2023, dalam tabel dibawah ini :

Data Capaian Layanan Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan Komprehensif di Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah tahun 2023

No.	Unit / Instansi	Kasus	Korban		Terlayani				
			Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	% Laki-laki	% Perempuan	% Total
1.	Barito Selatan	21	3	18	3	18	100	100	100
2.	Barito Timur	6	0	6	0	6	0	100	100
3.	Barito Utara	18	6	12	6	12	100	100	100
4.	Gunung Mas	8	0	8	0	8	0	100	100
5.	Kapuas	51	4	47	4	47	100	100	100
6.	Katingan	15	1	14	1	14	100	100	100
7.	Kota Palangkaraya	41	11	30	11	30	100	100	100
8.	Kotawaringin Barat	89	20	69	20	69	100	100	100
9.	Kotawaringin Timur	43	5	38	5	38	100	100	100
10.	Lamandau	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Murung Raya	7	1	6	1	6	100	100	100
12.	Pulang Pisau	23	2	21	2	21	100	100	100
13.	Seruyan	3	0	3	0	3	0	100	100
14.	Sukamara	17	2	15	2	15	100	100	100
TOTAL		342	55	287	55	287	100	100	100

Sumber Data : Syimponi Kabupaten/Kota

Dalam pelayanan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Tengah telah terbentuk UPTD -PPA yaitu :

No	Kab/Kota	Kelas	KETERANGAN
1.	Kab. Barito Utara	A	PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NO. 35 TAHUN 2018
2.	Kab Lamandau	B	PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 74 TAHUN 2020
3.	Kab. Katingan	B	PERBUP KATINGAN NOMOR 1 TAHUN 2021
4.	Kab.Pulang Pisau	B	PERATURAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 11 TAHUN 2021
5.	Kab. Kotawaringin Barat	A	PERBUP KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2021
6.	Kota Palangka Raya	A	PERDA WALIKOTA PALANGKARAYA NO 48 TAHUN 2020
7.	Kab.Kotim	A	PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 62 TAHUN 2022
8	Kab.Kapuas	B	PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 7 TAHUN 2021
9	Kab.Seruyan	B	DISETUJUI/ PROSES PERATURAN BUPATI
10	Kab.Gunung Mas	B	DISETUJUI/ PROSES PERATURAN BUPATI
11	Kab.Barito Selatan	B	DISETUJUI/ PROSES PERATURAN BUPATI
12	Kab.Sukamara	A	DISETUJUI/ PROSES PERATURAN BUPATI
13	Kabupaten Barito Timur	-	BELUM TERBENTUK/SEDANG PROSES
14	Kabupaten Murung Raya	-	BELUM TERBENTUK/SEDANG PROSES

Sumber Data: Dinas P3APPKB Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah. Didukung dengan anggaran APBD tahun 2023 Program Perlindungan Perempuan berjumlah 1.029.521.131, dengan realisasi anggaran dalam menunjang program sebesar 952.511.131,- (92,52 %) . Dengan capaian program yang dicapai 106,33 % dengan realisasi fisik keuangan 100 % masih silva anggaran keuangan sebesar 108.603.443,- dan menghemat anggaran Pemerintah (7,48 %) . Dengan Kerjasama Tim Bidang teknis dan Kerjasama semua ASN DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencapaian keberhasilan bersama.

Output/hasil dari capaian program 114,28 % dimana kegiatan dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai perencanaan, sesuai regulasi, efektif dan efisien sehingga menghasilkan nilai capaian output 114,28 % pada tahun 2023. Dampak/Outcome atau hasil dalam keberhasilan adalah Pemerintah hadir dalam pelayanan dan perlindungan terhadap kasus kekerasan terhadap Perempuan/Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kalimantan Tengah .

Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Terhadap Anak

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 3 (tiga) diukur melalui indikator Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan Komprehensif, Adapun capaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	7	8	9
1.	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Terhadap Anak	Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	55	55	100

Catatan : *) Data Syimponi Kabupaten/Kota

Capaian Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan Komprehensif pada tahun 2023 sebesar 100 % dimana untuk sasaran meningkatnya Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif belum mencapai target.

Data layanan anak yang dilayani secara komprehensif Kabupaten/kota se Kalimantan Tengah Tahun 2023, dalam tabel dibawah ini:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Korban		Jumlah Korban	
		N	Anak	% N	% Anak
1	Kotawaringin Barat	38	38	100,00	100,00
2	Kotawaringin Timur	33	33	100	100
3	Kapuas	36	36	100	100
4	Barito Selatan	18	18	100	100
5	Barito Utara	13	13	100	100
6	Sukamara	13	13	100	100
7	Lamandau	34	34	100	100
8	Seruyan	8	8	100	100
9	Katingan	31	31	100	100
10	Pulang Pisau	20	20	100	100
11	Gunung Mas	14	14	100	100
12	Barito Timur	8	8	100	100
13	Murung Raya	3	3	100	100
14	Kota Palangka Raya	13	13	100	100
Total		282	282	100	100

Sumber Data: Dinas P3APPKB Kabupaten/Kota

Didukung dengan anggaran APBD tahun 2023 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) berjumlah 778.448.913, dengan realisasi anggaran dalam menunjang program sebesar 754.656.114,- (96,94 %) . Dengan capaian fisik program keuangan 100 % masih tersisa silva anggaran keuangan sebesar 23.792.799,- dan menghemat anggaran Pemerintah sebesar (3,1%). Dengan

Kerjasama Tim Bidang teknis dan Kerjasama semua ASN DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencapaian keberhasilan bersama.

Output/hasil dari capaian program 100 % dimana kegiatan dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai perencanaan, sesuai regulasi, efektif dan efisien sehingga menghasilkan nilai capaian aoutput 100 % pada tahun 2022. Dampak/ Outcome dalam keberhasilan adalah Pemerintah hadir dalam perlindungan terhadap kasus kekerasan terhadap Anak di Kalimantan Tengah dan Menyiapkan Sumber Daya Unggul mulai dari Pemenuhan dan Perlindungan secara dini dalam di Kalimantan Tengah yang BERKAH.

Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Kualitas Keluarga

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 4 diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu : Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) dan Angka kelahiran Total/Total Fertility rate (TFR)

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Penncaapaian Kinerja Tahun 2023

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	60,32	54,04	89,53	62,44	54,35	86,88
		Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2,10	2,24	93,75	2,06	2,29	89,95

Catatan : *) Realisasi TFR tahun 2023 adalah Data Tahun 2022

Capaian Indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) pada tahun 2023 capaian sebesar 86,88 tercapai karena masuk kategori baik , dimana kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua Kabupaten/kota belum terpenuhi.

iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga di Kalimantan Tengah.

INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA (IBANGGA)
SETIAP KABUPATEN/KOTA WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Download

#	KABUPATEN/KOTA	2022	2023
		PK22	PK23
1.	KAB. KOTAWARINGIN BARAT	55,82	64,49
2.	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	53,50	63,67
3.	KAB. KAPUAS	50,46	56,67
4.	KAB. BARITO SELATAN	53,62	62,51
5.	KAB. BARITO UTARA	55,76	65,83
6.	KAB. KATINGAN	53,95	64,00
7.	KAB. SERUYAN	55,78	63,12
8.	KAB. SUKAMARA	54,43	65,85
9.	KAB. LAMANDAU	54,34	64,56
10.	KAB. GUNUNG MAS	51,60	59,76
11.	KAB. PULANG PISAU	54,14	59,19
12.	KAB. MURUNG RAYA	53,93	64,16
13.	KAB. BARITO TIMUR	54,79	63,34
14.	KOTA PALANGKARAYA	53,89	65,03
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		54,25	62,60

(Sumber : Siperindu Perwakilan BKKBN Kalteng)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Untuk iBangga Kalimantan Tengah Tahun 2023 terjadi peningkatan capaian iBangga yang cukup signifikan di Kalimantan Tengah pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas keluarga di Kalimantan Tengah dan kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting dalam meningkatkan kualitas keluarga di Kalimantan Tengah. Perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan

KB, serta intensifikasi edukasi dan promosi program KB juga berkontribusi pada peningkatan capaian iBangga.

Adapun beberapa Faktor Pendukung, antara lain:

1. Komitmen Pemerintah Daerah:

- Dukungan politik dan anggaran dari pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan keberhasilan program iBangga.
- Pemerintah daerah telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai cara, seperti:
 - Menetapkan kebijakan dan peraturan yang mendukung program iBangga.
 - Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program iBangga.
 - Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting yang efektif.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi program iBangga secara berkala.

2. Kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting:

- Tim Percepatan Penurunan Stunting memiliki peran penting dalam memastikan program iBangga berjalan dengan efektif.
- Tim ini harus terdiri dari berbagai pihak terkait, seperti:
 - BKKBN
 - Dinas Kesehatan
 - Dinas Pendidikan
 - Dinas Sosial
 - Akademisi, dan sektor lainnya
- Tim Percepatan Penurunan Stunting harus memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta memiliki kemampuan yang memadai dalam melaksanakan program iBangga.

3. Perluasan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Keluarga Berkualitas:

- Salah satu kunci utama untuk meningkatkan capaian iBangga adalah dengan memastikan semua masyarakat memiliki akses yang mudah terhadap layanan Keluarga Berkualitas.

- Upaya yang dapat dilakukan untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan Keluarga Berkualitas, antara lain:
 - Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan Keluarga Berkualitas.
 - Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dalam memberikan layanan KB.
 - Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk layanan KB.
 - Meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan KB.

4. Intensifikasi Edukasi dan Promosi Program Keluarga Berkualitas:

- Edukasi dan promosi program Keluarga Berkualitas yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang program iBangga.
- Upaya yang dapat dilakukan untuk intensifikasi edukasi dan promosi program Keluarga Berkualitas, antara lain:
 - Melakukan kampanye dan sosialisasi program iBangga melalui berbagai media, seperti media massa, media sosial, dan kegiatan penyuluhan.
 - Memberikan edukasi dan informasi tentang program Keluarga Berkualitas kepada kelompok sasaran, seperti remaja, pasangan muda, dan ibu hamil.
 - Melakukan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku untuk mengubah norma sosial dan budaya yang tidak mendukung program Keluarga Berkualitas.

Adapun beberapa Faktor Penghambat, antara lain:

1. Kualitas Data dan Informasi:

- Kualitas data dan informasi yang masih perlu ditingkatkan dapat menghambat capaian iBangga di Kalimantan Tengah.
- Data dan informasi yang tidak akurat dan tidak terkini dapat menyebabkan:
 - Perencanaan program yang tidak tepat sasaran.
 - Monitoring dan evaluasi program yang tidak efektif.
 - Pengambilan keputusan yang tidak tepat.

- Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas data dan informasi, antara lain:
 - Memperkuat sistem pendataan dan pelaporan program iBangga.
 - Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan kader dalam pengumpulan dan pengolahan data.
 - Melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala.

2. Kapasitas Tim Percepatan Penurunan Stunting:

- Kapasitas Tim Percepatan Penurunan Stunting yang masih perlu diperkuat dapat menghambat capaian iBangga di Kalimantan Tengah.
- Tim yang tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam melaksanakan program iBangga dapat menyebabkan:
 - Program yang tidak berjalan dengan efektif.
 - Target program yang tidak tercapai.
 - Kualitas program yang tidak optimal.
- Upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat kapasitas Tim Percepatan Penurunan Stunting, antara lain:
 - Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting.
 - Menyediakan dukungan teknis dan pendanaan yang memadai.
 - Membangun kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak terkait.

3. Norma Sosial dan Budaya:

- Norma sosial dan budaya yang belum sepenuhnya mendukung program KB dapat menghambat capaian iBangga di Kalimantan Tengah.
- Norma dan budaya yang tidak mendukung program KB dapat menyebabkan:
 - Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program KB.
 - Stigma dan diskriminasi terhadap pengguna KB.
 - Perkawinan Usia Anak.

- Upaya yang dapat dilakukan untuk mengubah norma sosial dan budaya yang tidak mendukung program KB, antara lain:
 - Melakukan edukasi dan komunikasi perubahan perilaku.
 - Melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuka adat dalam promosi program KB.
 - Melakukan advokasi dan kebijakan untuk mendukung program KB.

Meskipun ada beberapa hambatan dalam mencapai capaian iBangga di Kalimantan Tengah. Upaya yang terarah dan berkelanjutan perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan kerjasama dan sinergi dari semua pihak, diharapkan capaian iBangga dapat terus meningkat dan kualitas keluarga di Kalimantan Tengah dapat semakin baik. Begitu juga dengan keberhasilan program iBangga sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah, kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting, perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan KB, serta intensifikasi edukasi dan promosi program KB. Dengan kerjasama dan sinergi dari semua pihak, diharapkan capaian iBangga dapat terus meningkat dan kualitas keluarga di Indonesia dapat semakin baik. Capaian iBangga di Kalimantan Tengah menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas keluarga di Kalimantan Tengah telah menunjukkan hasil yang positif.

Output/hasil capaian program iBangga Kalimantan Tengah Tahun 2023

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan sebuah indeks komposit yang digunakan untuk mengukur kualitas keluarga di Indonesia. Indeks ini dihitung berdasarkan 12 indikator yaitu Kesertaan KB, Stunting, ASI Eksklusif, Imunisasi Dasar Lengkap, Sanitasi, Air Minum Layak, Pemanfaatan Layanan Kesehatan, Pendidikan Anak Usia Dini, Perlindungan Anak, Ketahanan Keluarga, Kesejahteraan Keluarga yang dikelompokkan ke dalam 3 dimensi, yaitu Dimensi Ketentraman, Dimensi Kemandirian dan Dimensi

Kebahagiaan. Peningkatan nilai Indeks iBangga di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa kualitas keluarga di Kalimantan Tengah semakin baik.

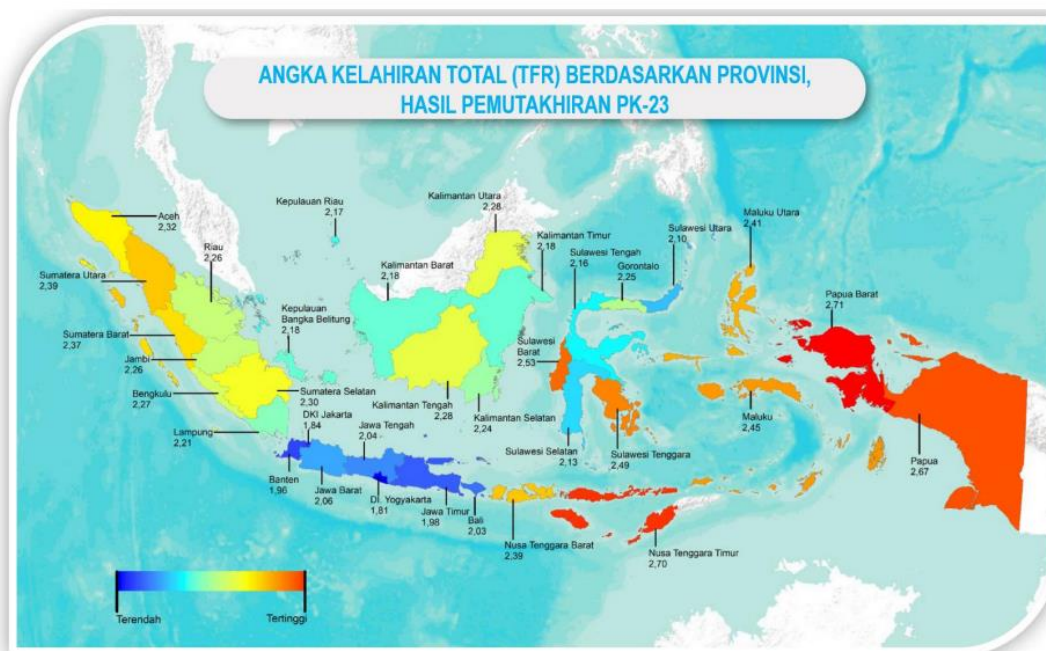
Output/hasil capaian program iBangga Kalimantan Tengah Tahun 2023 menunjukkan bahwa program iBangga telah menunjukkan hasil yang positif. Peningkatan nilai Indeks iBangga pada tahun 2023 dengan capaian 54,35 menunjukkan bahwa kualitas keluarga di Kalimantan Tengah semakin baik. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga perlu dilakukan secara komprehensif dan holistik, dengan mempertimbangkan semua dimensi iBangga.

Total Fertility Rate (TFR) per WUS usia 15-49 Tahun merupakan jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung atau rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya.

Total Fertility Rate (TFR) per WUS usia 15-49 Tahun pada tahun 2022 capaian 2,24 . Untuk tahun 2023 capaian 2,29 meningkat dari tahun 2022. Indikator ini penting dan strategis untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu negara ataupun seluruh negara dalam mengendalikan jumlah penduduknya melalui program Keluarga Berencana. Dalam hal ini, TFR sebesar 2,1 merupakan angka standar capaian ideal bagi seluruh negara (penduduk tumbuh seimbang). Dengan TFR 2,1 maka 2 orang anak yang dilahirkan hanya akan menggantikan kedua orang tuanya.

Adapun capaian TFR (TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah Tahun 2022, dapat dilihat pada table dibawah ini:

Data (TFR) Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah



(Sumber : Kabupaten/Kota se Kalteng)

TFR di Kalimantan Tengah menunjukkan 2,29 anak per perempuan di tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. TFR 2.29 di Kalimantan Tengah Tahun 2023 menunjukkan bahwa rata-rata seorang perempuan di Kalimantan Tengah melahirkan 2.29 anak selama masa reproduksinya. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan target nasional TFR 2.06 anak per perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kalimantan Tengah.

Adapun beberapa Faktor Pendukung, antara lain:

1. Perluasan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan KB:

- **Perluasan Akses Layanan KB:**

- Peningkatan jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan KB, seperti puskesmas, klinik KB, dan posyandu.
- Peningkatan jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dalam memberikan layanan KB.
- Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk layanan KB.

- **Peningkatan Kualitas Layanan KB:**

- Peningkatan mutu pelayanan KB.
- Peningkatan sikap dan perilaku tenaga kesehatan dalam memberikan layanan KB.
- Peningkatan konseling dan edukasi kepada pengguna layanan KB.

2. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi tentang Program Keluarga Berkualitas:

- **Peningkatan Kesadaran:**

- Kampanye dan sosialisasi program Keluarga Berkualitas melalui berbagai media, seperti media massa, media sosial, dan kegiatan penyuluhan.
- Pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuka adat dalam promosi program Keluarga Berkualitas.
- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk promosi program Keluarga Berkualitas.

- **Peningkatan Edukasi:**

- Penyediaan informasi yang lengkap dan jelas tentang program Keluarga Berkualitas.
- Pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan seksual bagi remaja dan pemuda.
- Pembinaan ketahanan keluarga.

3. Pergeseran Norma Sosial dan Budaya:

- **Perubahan norma sosial dan budaya yang tidak mendukung program Keluarga Berkualitas:**

Edukasi dan komunikasi perubahan perilaku (KPP) untuk mengubah norma dan budaya yang tidak mendukung program Keluarga Berkualitas.

- **Pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuka adat dalam advokasi dan kebijakan untuk mendukung program Keluarga Berkualitas:**

Seminar, lokakarya, dan pertemuan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuka adat untuk membahas tentang pentingnya program Keluarga Berkualitas.

- **Pembuatan peraturan daerah yang mendukung program Keluarga Berkualitas:**

Mewajibkan pasangan usia subur (PUS) untuk mengikuti program KB.

4. Faktor Lain:

- **Peningkatan tingkat pendidikan dan ekonomi:**

Masyarakat dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki lebih sedikit anak.

- **Urbanisasi:**

Biaya hidup di kota yang lebih tinggi dan akses yang lebih mudah terhadap layanan Keluarga Berkualitas.

- **Peningkatan usia pernikahan:**

Perempuan memiliki lebih sedikit waktu untuk hamil dan melahirkan selama masa reproduksinya.

Faktor Penghambat Penurunan TFR di Kalimantan Tengah:

1. Faktor Sosial Budaya:

- **Norma dan budaya patriarki:**

Budaya patriarki yang masih kuat di Kalimantan Tengah, di mana laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama dan perempuan

bertanggung jawab atas urusan rumah tangga dan anak-anak, dapat mendorong perempuan untuk memiliki lebih banyak anak.

- **Ketersediaan tenaga kerja anak:**

Di beberapa daerah pedesaan di Kalimantan Tengah, anak-anak masih dianggap sebagai tenaga kerja yang membantu orang tua mereka dalam pekerjaan pertanian atau perkebunan.

- **Nilai dan kepercayaan tradisional:**

Nilai dan kepercayaan tradisional yang menganggap bahwa banyak anak adalah berkah dan simbol kesuburan dapat menghambat upaya penurunan TFR.

2. Faktor Ekonomi:

- **Kemiskinan:**

Kemiskinan dapat mendorong perempuan untuk memiliki lebih banyak anak sebagai jaminan sosial di masa depan.

- **Biaya hidup:**

Biaya hidup yang tinggi di beberapa daerah di Kalimantan Tengah, terutama di kota-kota besar, dapat menjadi hambatan bagi keluarga untuk memiliki lebih banyak anak.

- **Akses terhadap pendidikan dan pekerjaan:**

Terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan dapat mendorong mereka untuk menikah dan memiliki anak di usia muda

3. Faktor Akses dan Kualitas Layanan KB:

- **Akses terhadap layanan KB:**

Di beberapa daerah terpencil di Kalimantan Tengah, akses terhadap layanan KB masih terbatas. **Kualitas layanan KB:**

Kualitas layanan KB yang kurang memadai, seperti kurangnya informasi dan pilihan metode KB, dapat membuat perempuan enggan untuk menggunakan KB.

- **Kesadaran dan edukasi tentang program KB:**

Kurangnya informasi dan edukasi tentang program KB, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, dapat menjadi hambatan bagi penurunan TFR.

4. Faktor Lain:

- **Ketersediaan dan akses terhadap informasi:**

- Ketersediaan dan akses terhadap informasi yang akurat tentang kesehatan reproduksi dan seksual masih terbatas di beberapa daerah di Kalimantan Tengah.

- **Keterlibatan laki-laki dalam program KB:**

- Kurangnya keterlibatan laki-laki dalam program KB dapat menjadi hambatan bagi penurunan TFR.

Dapat disimpulkan bahwa Capaian TFR di Kalimantan Tengah menunjukkan kemajuan pada tahun 2023, namun masih belum mencapai target nasional. Penurunan TFR di Kalimantan Tengah Tahun 2023 dihambat oleh berbagai faktor, termasuk faktor sosial budaya, ekonomi, akses dan kualitas layanan KB, dan faktor lain seperti ketersediaan dan akses terhadap informasi dan keterlibatan laki-laki dalam program KB. Capaian TFR 2.29 di Kalimantan Tengah Tahun 2023 menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kalimantan Tengah. Diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari semua pihak untuk menurunkan TFR di Kalimantan Tengah.

Dari 2 (dua) indikator semuanya mencapai target karena capaian diatas 80 % yang dikategorikan baik dalam capaian organisasi kinerja.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Keluarga didukung dengan anggaran APBD tahun 2023 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) berjumlah 1.473.155.100 dengan realisasi capaian fisik 100 % dan realisasi keuangan 1.436.850.404,- (97,54 %), ada tersisa silva anggaran

keuangan sebesar 36.304.696,- dan anggaran dikembalikan ke Pemerintah sebesar (24,6 %). Dengan Kerjasama Tim Bidang teknis baik Provinsi dan Kabupaten/kota dan Kerjasama semua ASN DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencapaian keberhasilan bersama.

Output/hasil capaian TFR Kalimantan Tengah Tahun 2023

Output/hasil dari capaian program 89,95 % TFR di Kalimantan Tengah pada tahun 2023 menjadi 2.28 dari 2.24 pada tahun 2022. Meskipun TFR 2.28 masih lebih tinggi dibandingkan dengan target nasional TFR 2.0 anak per perempuan. Hal ini menunjukkan adanya upaya dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kalimantan Tengah. Diperlukan upaya yang lebih keras untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang program KB, serta memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan KB. Pergeseran norma sosial dan budaya yang mendukung program KB juga perlu dilakukan untuk mencapai target TFR nasional.

Output/Hasil Capaian Program TFR Kalimantan Tengah Tahun 2023 menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kalimantan Tengah. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan untuk mencapai target nasional TFR 2.0 anak per perempuan. Diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari semua pihak untuk meningkatkan TFR di Kalimantan Tengah.

Dampak/ Outcome dalam keberhasilan adalah Pemerintah hadir dalam perlindungan Kualitas Keluarga dalam mengatur Jarak Kelahiran di Kalimantan Tengah dan Pencegahan Stunting dan Perkawinan Usia Anak (PUA) dengan pendekatan Keluarga Berkualitas sehingga menyiapkan Sumber Daya yang Unggul dan Berkualitas di Kalimantan Tengah BERKAH dimulai dari keluarga.

Sasaran Strategis 5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 5 diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu : Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP.

Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2022

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	71,27	80,75	113,3

Capaian Indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 71,27 dan realisasinya sebesar 80,75, tingkat capaian sebesar 113,3 %. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 9,48 poin. Dimana pada tahun 2022 nilai 80,75 predikat A (Sangat memuaskan) . Penilaian tersebut menunjukkan bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintah berorientasi hasil , karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon IV/pengawas/subkoordinator.

. Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Capaian indikator ini dipengaruhi oleh 5 komponen, yaitu :

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Kinerja
5. Pencapaian Kinerja

Capaian Indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP tahun 2022 ditargetkan sebesar 71,27 dan realisasinya sebesar 80,75 tingkat capaian sebesar 113,3%.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	70,52	61,55	70,57	71,12	80,75

Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2021 sebesar 71,12, lebih tinggi 0,75 poin dari tahun 2020 sebesar 70,57. Peningkatan capaian ini dipengaruhi oleh peningkatan pada komponen Pencapaian Kinerja, pelaporan kinerja dan pengukuran kinerja.

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Periode RENSTRA

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra 2026	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	82,47	80,75	80,75

Capaian Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP tahun 2022 sebesar 80,75 dibandingkan dengan target akhir Renstra pada 2026 sebesar 82,47, baru mencapai target atau tingkat kemajuannya sebesar 80,75 %.

Tabel Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	Rp 12.272.169.181,-	69.61

Upaya pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja didukung oleh anggaran APBD tahun 2023 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp. 12.272.169.181,- atau 69,61% dari Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 5.357.532.563.

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Sasaran 75: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	71,27	80,75	113,3	12.272.169.181	10,798,307	87,99

Pencapaian Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh 1 (satu) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Pada Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, perbandingan antara rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 87,99%, menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 12,01 %. Dengan Kerjasama Tim semua ASN DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencapaian komitmen bersama .

Output/hasil dari capaian program 100 % dimana kegiatan dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan sudah sesuai dari perencanaan, sesuai regulasi, efektif dan efisien sehingga menghasilkan nilai capaian output 100% pada tahun 2023. Dampak/Outcome dalam keberhasilan adalah

tercapainya tujuan dan hasil dari Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menyiapkan Sumber Daya yang Unggul dan Berkualitas di Kalimantan Tengah BERKAH dimulai dari Perlindungan Perempuan, Perlindungan dan pemenuhan Hak Anak serta Keluarga Berkualitas.

3.1. REALISASI ANGGARAN

Realisasi keuangan secara umum pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	
			Keuangan	
			Rp	%
1	2	3	4	5
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	14.945.745.489	13.285.158.924	88,76
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14.462.986.189	12.859.930.274	88,91
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.066.681.398	9.789.321.995	88,46
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	230.237.850	262.761.306	87,62
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.245.900	15.472.750	49,52.

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	
			Keuangan	
			Rp	%
1	2	3	4	5
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	23.638.100	23.613.000	99.89.
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.208.500	26.198.000	99.96.
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	204.896.350	197.477.556	96,38
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.305.000.635	6.284.201.829	86.03.
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.233.500.635	6.213.059.649	85.89.
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000	6.500.000	100..
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	65.000.000	64.642.180	99.45.
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.500.000	13.500.000	100
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	13.500.000	13.500.000	100
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.642.000	23.525.860	47.39.
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	49.642.000	23.525.860	47.39.

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	
			Keuangan	
			Rp	%
1	2	3	4	5
	Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.673.032.826	1.587.025.204	94,86
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.504.000	26.504.000	100..
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.640.000	91.356.000	95,52
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	62.000.000	61.999.800	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39.250.000	22.695.000	57.82.
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	396.900.000	396.522.000	99,90
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	996.958.826	987.948.404	99,10
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	102.210.000	72.129.000	70.57.
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	627.969.000	607.389.000	96,72

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	
			Keuangan	
			Rp	%
1	2	3	4	5
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	450.469.000	381.426.000	84.67.
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	227.500.000	225.963.000	99,32
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.724.567.562	831.819.283	48.23.
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.500.000	10.500.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	533.545.162	232.149.283	43.51.
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.186.022.400	589.170.000	49.68.
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.386.250	106.970.513	87,40
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.166.250	68.800.513	94,03
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.220.000	38.170.000	77,55

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	
			Keuangan	
			Rp	%
1	2	3	4	5
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.283.531.350	1.252.050.952	97.55.
2.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	188.500.000	165.512.102	87.8.
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	70.000.000	47.573.570	67.96.
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	70.000.000	69.540.730	99.34.
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	48.500.000	48.397.802	99.79.
2.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	1.069.681.350	1.062.513.850	99,33
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan	959.000.000	951.377.400	99.21.

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	
			Keuangan	
			Rp	%
1	2	3	4	5
	Ekonomi Kewenangan Provinsi			
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	114.681.350	111.136.450	96,91
2.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	37.000.000	24.025.000	64.93.
	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	37.000.000	24.025.000	64.93.
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	732.330.621	670.752.283	91.59.
3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	406.027.000	398.716.655	98,20
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan	47.921.000	47.775.000	99.7.

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	
			Keuangan	
			Rp	%
1	2	3	4	5
	Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi			
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	358.106.000	350.941.655	98
3.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	225.177.577	218.565.628	97.06.
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	130.907.577	128.490.628	98.15.
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	90.520.000	90.075.000	99.51.

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	
			Keuangan	
			Rp	%
1	2	3	4	5
3.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	124.876.044	53.470.000	42.82.
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	99.876.044	48.470.000	48.53.
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	25.000.000	5.000.000	20..
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	157.547.750	151.913.250	96.42.
4.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	74.398.750	71.209.250	95.71.
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	74.398.750	71.209.250	95.71.

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	
			Keuangan	
			Rp	%
1	2	3	4	5
4.30	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	83.149.000	80.704.000	97.06.
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	83.149.000	80.704.000	97.06.
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	218.245.000	211.606.300	96.96.
5.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	218.245.000	211.606.300	96.96.
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	67.320.000	65.838.000	97.8.
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak	150.925.000	145.768.300	96.58.

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	
			Keuangan	
			Rp	%
1	2	3	4	5
	dalam Kelembagaan Data Provinsi			
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	360.341.370	353.945.344	98.23.
6.1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	233.795.650	232.501.100	99,45
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga	161.187.850.	160.072.100	99,31
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	72.608.000	72.429.000	99.75.
6.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	170.654.720	121.444.244	71.16.
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	105.593.000	59.493.744	56.34.
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga	65.061.720	61.950.500	95.22.

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	
			Keuangan	
			Rp	%
1	2	3	4	5
	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	527.592.211	430.340.150	81.57.
7.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	75.450.000	75.228.000	99.71.
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi	75.450.000	75.228.000	99.71.
7.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	452.142.211	355.112.150	78.54.
	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	130.902.000	130.118.800	99,40
	Koordinasi dan Sinkronisasi	351.240.211	224.993.350	64.06.

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	
			Keuangan	
			Rp	%
1	2	3	4	5
	Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (DAK)			
B	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	482.759.300,-	405.228.650,-	83,94
8	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	198.477.300	136.596.300	68.82.
8.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	198.477.300	136.596.300	68.82.
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	150.000.000	90.582.500	60.39.
	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	48.477.300	46.013.800	94.92.
9	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	136.994.500	127.029.850	92.73.
9.1	Pengembangan Desain Program,	52.024.500	48.253.000	92.75.

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	
			Keuangan	
			Rp	%
1	2	3	4	5
	Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal			
	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	52.024.500	48.253.000	92.75.
9.2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	84.970.000	78.776.850	92.71.
	Pembinaan Promosi Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBP dan Konseling Kesehatan Reproduksi	84.970.000	78.776.850	92.71.

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	
			Keuangan	
			Rp	%
1	2	3	4	5
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	147.287.500	141.602.500	96.14.
10.1	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	147.287.500	141.602.500	96.14.
	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	147.287.500	141.602.500	96.14.
JUMLAH BELANJA DAERAH		14.829.029.000	13.265.158.924	88,76

Sumber Data: Keuangan Dinas P3APPKB Prov.Kalteng

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan tengah pada Tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-NF), dengan Pagu sebesar Rp. 17.629.701.744 ,-, terealisasi sebesar Rp. . 15.605.562.564 , - atau 88,52 % keuangan dan capaian fisik 96,49 %.

3.3. CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Realisasi	Capaian	Satuan
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan KB (%)	100,00	100,00	%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen RENJA SKPD	1,00	1,00	dokumen
KoorDinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	1,00	1,00	dokumen
KoorDinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen LAKIP SKPD	1,00	1,00	dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Rapat KoorDinasi Perencanaan dan Rapat Evaluasi dengan Kab/Kota se-Kalimantan Tengah	1,00	1,00	dokumen

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Realisasi	Capaian	Satuan
1	2	3	4	5
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	9,00	9,00	bulan
KoorDinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan SKPD	1,00	1,00	dokumen
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Dokumen Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik SKPD	1,00	1,00	dokumen
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah bulan penyediaan	12,00	12,00	bulan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah bulan penyediaan	12,00	12,00	bulan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan	12,00	12,00	bulan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan	12,00	12,00	bulan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan	12,00	12,00	bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Realisasi	Capaian	Satuan
1	2	3	4	5
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan	12,00	12,00	bulan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan penyediaan	12,00	12,00	bulan
Penyelenggaraan Rapat KoorDinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan	12,00	12,00	bulan
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah bulan penyediaan	12,00	12,00	bulan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah (%)	100,00	100,00	%
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset SKPD (Tahun)	1,00	1,00	tahun
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Tahun)	1,00	1,00	tahun
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100,00	100,00	%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan	12,00	12,00	bulan
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan	12,00	12,00	bulan
Penyediaan Jasa	Jumlah bulan	12,00	12,00	bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Realisasi	Capaian	Satuan
1	2	3	4	5
Pelayanan Umum Kantor	penyediaan			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)	100,00	100,00	%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan penyediaan	12,00	12,00	bulan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan penyediaan	12,00	12,00	bulan
PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Focal Point PUG SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah	30,00	30,00	orang
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1,00	1,00	dokumen
KoorDinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen ARG SKPD	15,00	15,00	dokumen
KoorDinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG	Jumlah Monev PUG di Kab/ Kota	7,00	7,00	kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Realisasi	Capaian	Satuan
1	2	3	4	5
Kewenangan Provinsi				
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Dokumen Hasil Rakor	1,00	1,00	dokumen
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	1,00	1,00	dokumen
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Dokumen Hasil Kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	5,00	5,00	dokumen
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Dokumen Hasil Promosi	1,00	1,00	dokumen
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1,00	1,00	dokumen

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Realisasi	Capaian	Satuan
1	2	3	4	5
Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemerdayaan perempuan kewenangan provinsi	Jumlah Perempuan UMKM Menengah yang dilatih	20,00	20,00	orang
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan	87,5	87,5	%
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak	1,00	1,00	dokumen
KoorDinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten yang SDM nya terlatih dalam Bimbingan Tekhnis dan Supervisi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dan TPPO	3,00	3,00	kab/kota
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	3,00	3,00	kab/kota
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan	Dokumen Pelaksanaan Layanan korban kekerasan	1,00	1,00	dokumen

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Realisasi	Capaian	Satuan
1	2	3	4	5
Korban Kekerasan yang memerlukan KoorDinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya barang dan jasa penunjang pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak pada UPT PPA	12,00	12,00	bulan
KoorDinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Dokumen pelaksanaan kegiatan koorDinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan	1,00	1,00	dokumen
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	0,00	0,00	dokumen
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang terlatih sebagai Tenaga Pendamping Korban Kekerasan dan pendataan kasus melalui aplikasi simfoni	30,00	30,00	orang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Realisasi	Capaian	Satuan
1	2	3	4	5
Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Kebutuhan Spesifik Perempuan	1,00	1,00	kegiatan
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah peserta Pelatihan Usaha Perempuan Korban Kekerasan	40,00	40,00	orang
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang membentuk forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	1,00	1,00	kab/kota
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang membentuk forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	18,00	18,00	kab/kota
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG lintas prov dan kab/kota	1,00	1,00	dokumen
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan	Dokumen hasil pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG lintas prov dan kab/kota	1,00	1,00	dokumen

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Realisasi	Capaian	Satuan
1	2	3	4	5
Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen hasil program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	12,00	12,00	dokumen
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen pelaksanaan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	1,00	1,00	dokumen
Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Dokumen laporan hasil publikasi data gender dan anak dan laporan Pengembangan Layanan Keterbukaan Informasi Publik.	2,00	2,00	laporan
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Dokumen profil data terlahir gender tingkat provinsi	1,00	1,00	dokumen
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Peningkatan Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA	8,00	8,00	kab/kota
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA	57,14	57,14	%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Dokumen hasil pelaksanaan	1,00	1,00	dokumen

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Realisasi	Capaian	Satuan
1	2	3	4	5
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga	Pembinaan dan Bimbingan Pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak			
KoorDinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen hasil Monitoring Evaluasi Pencapaian dan Pelaksanaan KLA	1,00	1,00	dokumen
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	1,00	1,00	dokumen
KoorDinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen hasil Rakornas FAN	1,00	1,00	dokumen
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil Rapat KoorDinasi Forum Anak Provinsi (Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi)	1,00	1,00	dokumen
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Anak dari tindak kekerasan (%)	55	55	%
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para	1,00	1,00	dokumen

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Realisasi	Capaian	Satuan
1	2	3	4	5
para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	pihak			
KoorDinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen hasil KoorDinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Proviinsi	1,00	1,00	dokumen
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan KoorDinasi Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koorDinasi	1,00	1,00	dokumen
Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen pelaksanaan kegiatan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	1,00	1,00	dokumen
KoorDinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (DAK)	Dokumen pelaksanaan kegiatan koorDinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	1,00	1,00	dokumen
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang	Dokumen pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak	1,00	1,00	dokumen

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Realisasi	Capaian	Satuan
1	2	3	4	5
Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
KoorDinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen KoorDinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak	1,00	1,00	dokumen
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR)	2,06	2,06	-
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk	1	1	dokumen
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen hasil Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	1,00	1,00	dokumen
Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Dokumen hasil Advokasi dan Sosialisasi GDPK	0,00	0,00	dokumen
PROGRAM PEMBINAAN KB (KB)	Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	5,18	5,18	%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Realisasi	Capaian	Satuan
1	2	3	4	5
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen hasil pengembangan design program, pengelolaan dan pelaksanaan Advokasi, KIE, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local	1,00	1,00	dokumen
Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, KB dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah kegiatan KIE PP,KB dan Pembangunan Keluarga	1,00	1,00	kegiatan
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dokumen Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1,00	1,00	dokumen
Pembinaan Promosi Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK dan	Dokumen hasil Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	1,00	1,00	dokumen

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Realisasi	Capaian	Satuan
1	2	3	4	5
Konseling Kesehatan Reproduksi				
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	62,44	62,44	-
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen hasil pelaksanaan pelaksanaan design program pembangunan keluarga	1,00	1,00	dokumen
Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Kabupaten / Kota yang mendapatkan Fasilitasi, Pembimbingan , Pengembangan dan Penguatan Pengasuhan 1000 HPK	3,00	3,00	kabupaten/kota

Sumber Data: Perencanaan Dinas P3APPKB Prov.Kalteng

3.4 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI/REKOMENDASI

Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan oleh DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dari hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DP3PPKB yang dilakukan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 adalah :

REKOMENDASI LHE 2022

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah agar melakukan Langkah-langkah perbaikan dengan menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian tunjangan kinerja aparatur serta dalam penempatan jabatan baik struktural maupun fungsional

Rencana Aksi Tindak Lanjut LHE 2022

1. Kewenangan Kepala Dinas P3APKB dalam Pengukuran kinerja dilakukan pengawasan melekat dan berjenjang dengan menerapkan SPAN Of Control yang dilakukan secara berkala.
Yang terdiri dari :
 - Memberikan penilaian kinerja pada SKP secara berjenjang
 - Reward dan Punishmen tidak dalam bentuk Uang tapi dalam bentuk sertifikat untuk pejabat eselon III untuk keberhasilan capaian Kinerja yang dilampirkan setiap tahun dalam laporan SAKIP
2. Bukan kewenangan Kepala OPD dalam pemberian tunjangan kinerja ASN
3. Bukan Kewenangan Kepala OPD Dalam penempatan jabatan baik struktural maupun fungsional, Kepala OPD hanya memberikan rekomendasi ke Sekretaris Daerah dan BKD Provinsi Kalteng sebagai masukan berdasarkan capaian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada Renstra Tahun 2021-2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan 6 (enam) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran yang akan dicapai. Dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja tahun 2023 memuat 5 (lima) sasaran selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 6 (enam) indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa 6 (enam) sasaran dapat dicapai dengan hasil **SANGAT BAIK**.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

Sedangkan untuk kategori capaian digunakan sebagai berikut :

Rentang Capaian	Kategori Capaian
Lebih dari 100%	Sangat Baik
75% sampai dengan 100%	Baik
55% sampai 75 %	Cukup
Kurang dari 55%	Kurang

Berdasarkan uraian capaian kinerja dari Indikator Kinerja Sasaran Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023, dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1 : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan mendapat predikat nilai **Sangat Baik**, dengan rata-rata capaian sebesar **100,07%**. Hal ini terbukti dari hasil pengukuran 1 (satu) Indikator Sasaran.

- SASARAN 2 : Meningkatnya pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif predikat nilai **Sangat Baik**, dengan capaian sebesar 111,57 %. Hal ini terbukti dari hasil pengukuran 1 (satu) Indikator Sasaran.
- SASARAN 3 : Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan terhadap anak dengan kategori nilai **Baik**, dengan capaian sebesar 100 %. Hal ini terbukti dari hasil Pengukuran 1 (satu) indikator.
- SASARAN 4 : Meningkatnya Kualitas Keluarga dengan kategori nilai **Baik** , dengan capaian Ibangga sebesar 86,88 %. Dan TFR 89,95 % Hal ini terbukti dari hasil Pengukuran 2 (dua) indikator
- SASARAN 5 : Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan kategori nilai **Sangat Baik**, dengan capaian sebesar 101,06 %. Hal ini terbukti dari hasil Pengukuran 1 (Satu) indikator sasaran

Untuk meningkatkan capaian kinerja organisasi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah akan melakukan langkah-langkah optimalisasi, melalui :

1. Kabupaten/ Kota dapat dapat merencanakan kegiatan yang selaras dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Dengan Arah kegiatan DP3APPKB ke Promosi, Pemenuhan dan Perlindungan
2. Terbentuknya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kabupaten/Kota
3. Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan (Industri Rumahan) Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Dengan Hapakat Membangun Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Di Provinsi Kalimantan Tengah

4. Propinsi Kalteng menargetkan nilai minimal Pratama di seluruh Kabupaten/Kota untuk Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dalam Pencapaian PROVINSI LAYAK ANAK
5. Mendukung capaian Prioritas Nasional untuk Pencegahan STUNTING dan Perkawinan Usia Anak (PUA) di Kalimantan Tengah dengan Pendekatan Keluarga, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Perguruan Tinggi di Kalimantan Tengah
6. Membangun Komitmen dalam percepatan penurunan Stunting dan Perkawinan Usia Anak (PUA) di Kalimantan Tengah dengan pendekatan Keluarga berisiko Stunting.
7. Advokasi dan pendampingan ke Kabupaten/Kota untuk membentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis masyarakat (PATBM).
8. Memberikan Pemahaman dalam bidang Politik, Sosial dan budaya kepada Organisasi dan Forum Perempuan yang ada di Kalimantan Tengah .
9. Melakukan advokasi/pendampingan kepada UPTD-PPA Kab/Kota dalam rangka penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM pengelola UPTD-PPA dalam rangka layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, Tersosialisasi UU TPPKS No 12 tahun 2022

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 yang dapat kami sajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan yang sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.



LAMPIRAN

i. FORM PENDANAAN INDIKATIF PADA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026

- TUJUAN** : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan
- TUGAS** : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- FUNGSI** :
1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga Berencana, Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan		Indeks Pembangunan Gender (IPG)		89,07	89,07	89,09	89,11	89,13	89,15
		Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,90	81,90	81,92	81,94	81,96	81,98
				Persentase ARG pada belanja langsung APBD		3,43 %	3,50 %	3,60 %	3,70 %	4,00 %
2	Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan									
		Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	85 %	85 %	87,5 %	90 %	92,5 %	95 %
3	Meningkatkan Kualitas hak Anak dan Perlindungan khusus terhadap anak									
		Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	61,83	61,83	63,68	65,59	67,55	69,57
				Persentase Anak Memerlukan perlindungankhusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	50 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %
4	Meningkatkan Kualitas data terkait Dinas P3APPKB									
		Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah		Jumlah Ketersediaan Data serta Informasi DP3A tingkat Kab/Kota se-Kalimantan Tengah	6 Kab/Kota	6 Kab/Kota	8 Kab/Kota	10 Kab/Kota	12 Kab/Kota	14 Kab/Kota
5	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mPCR)	73,23	73,23	73,68	74,26	74,26	74,26	
	Meningkatkan kualitas keluarga		Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	60,32	60,32	62,44	64,55	64,55	64,55	
			Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2,10	2,10	2,06	2,00	1,96	1,96	
			Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	21	21	20	18	16	16	
	Meningkatnya akseptor KB		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mPCR)	73,23	73,23	73,68	74,26	74,26	74,26	
			Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	5,36 %	5,36 %	5,18 %	5 %	5,01 %	5,01 %	
6	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	70	70	74	77	80	85	

	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	BB
--	---	--	------------------------------	----	----	----	----	----	----

SASARAN		DEFINISI OPEASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	REALISASI		TARGET KINERJA				PROGRAM	PAGU INDIKATIF RENSTRA			
URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		2021	2022	2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pengarusutamaan Gender	Indeks Pengarusutamaan Gender dihitung berdasarkan pencapaian terhadap 7 Prasyarat Gender	81,88	81,90	81,92	81,94	81,96	81,98	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.309.201.977	1.335.514.370	1.495.314.023	1.559.490.590
									Program Perlindungan Perempuan	746.977.233	761.990.011	853.165.173	889.781.705
									Program Peningkatan Kualitas Keluarga	160.698.705	163.928.434	183.543.129	191.420.516
Meningkatkan Kualitas Data Gender dan Anak	Mengoptimalkan kualitas data gender dan anak	Dokumen hasil program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan							Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	222.609.900	227.083.923	254.255.425	265.167.675
Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak	IPA merupakan presentasi dari capaian pembangunan perlindungan anak Indonesia yang memuat Klaster I-V, yaitu : - Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan - Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif - Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan - Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya - Klaster V Perlindungan Khusus	61,83	61,83	63,68	65,59	67,55	69,57	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	367.548.197	374.935.195	419.797.696	437.814.765

		$IPA = \sum_{j=1}^5 (W_j \times Indeks K_j)$											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Anak dari tindak kekerasan (%)	50	50	55	60	65	70	Program Perlindungan Khusus Anak	589.622.435	601.472.690	673.441.311	702.344.371
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	60,32	62,44	64,55	64,55	64,55	64,55	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	150.233.250	153.252.644	171.589.938	178.954.313
	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) perWUS usia 15-49 Tahun	Angka Kelahiran Total (TFR) adalah Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya Sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkatkelahiran	2,1	2,1	2,06	2	1,96	1,96	Program Pengendalian Penduduk	202.446.846	206.515.631	231.226.055	241.149.920

$$TFR = 5 \sum_{i=15}^{45} ASFR_i$$

ASFR_i : ASFR untuk wanita pada kelompok usia ke-*i*
i = kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49

		Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	5,36	5,18	5	5,01	5,01	5,01	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	139.734.390	142.542.777	159.598.593	166.448.318
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	Evaluasi implementasi SAKIP adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Capaian indikator ini dipengaruhi oleh 5 komponen, yaitu : 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Kinerja 5. Pencapaian Kinerja	70	74	77	80	83	85	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.236.536.646	11.462.369.000	12.833.887.444	13.384.698.064

ii. PERJANJIAN KINERJA



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Brigjen Katamso Nomor 11 Telepon (0536) 3234547, email dp3appkb@kalteng.go.id Palangka Raya
Kalimantan Tengah 73112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M. Kes**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN, S.IP**
Jabatan : **GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Palangka Raya, 31 Januari 2023
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. SUGIANTO SABRAN, S.IP

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M. Kes
NIP. 196807171999032008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Brigjen Katamso Nomor 11 Telepon (0536) 3234547, email dp3appkb@kalteng.go.id Palangka Raya
Kalimantan Tengah 73112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr. LINEAE VICTORIA ADEN, M.M. Kes**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN, S.IP**

Jabatan : **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS

H. SUGIANTO SABRAN, S.IP

dr. LINEAE VICTORIA ADEN, M.M. Kes
NIP. 19680717 199903 2 006

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	81,92
2	Meningkatnya Pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan Komprehensif	persen	87,5 %
3	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Terhadap Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	55 %
4	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	persen	62,44 %
		Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate/TFR per WUS Usia 15-49 Tahun	2,06
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama Rasio anak korban kekerasan	Skor	BB

	Program		Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Provinsi	Rp	12,214,000,558
2.	Program Pengarusutamaan Gender Dan pemberdayaan Perempuan	.Rp	1.609.201.977
3.	Program Perlindungan Perempuan	.Rp	1.132.536.131
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	.Rp	160.698.705
5.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	.Rp	222.609.900
6.	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	.Rp	931.804.413
7.	Program Perlindungan Khusus Anak	.Rp	589.622.435
8.	Program Pengendalian Penduduk	.Rp	202.446.846
9.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	.Rp	64.222.990
10	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan keluarga Sejahtera (Ks)	.Rp	2.000.000.000

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN, S.IP

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS



dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M. Kes
NIP. 19680717 199903 2 006

iii. REKAPITULASI DATA

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	% Capaian tahun 2023
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,92 Indeks	82,41	82,41	82,08	81,98	100,07
Meningkatnya pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	87,5	100	100	108,36	114,28	111,57
Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	55	100	84,62	50	52	94,55
Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	62,44	-	-	54,01	54,25	86,88
	Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2,06	-	2,24	2,24	2,29	89,95
7. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	BB Skor	BB	BB	BB	A	A

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan		Indeks Pembangunan Gender (IPG)		89,07	89,07	89,09	89,11	89,13	89,15
		Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,90	81,90	81,92	81,94	81,96	81,98
				Persentase ARG pada belanja langsung APBD		3,43 %	3,50 %	3,60 %	3,70 %	4,00 %
2	Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan									
		Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan	85 %	85 %	87,5 %	90 %	92,5 %	95 %	

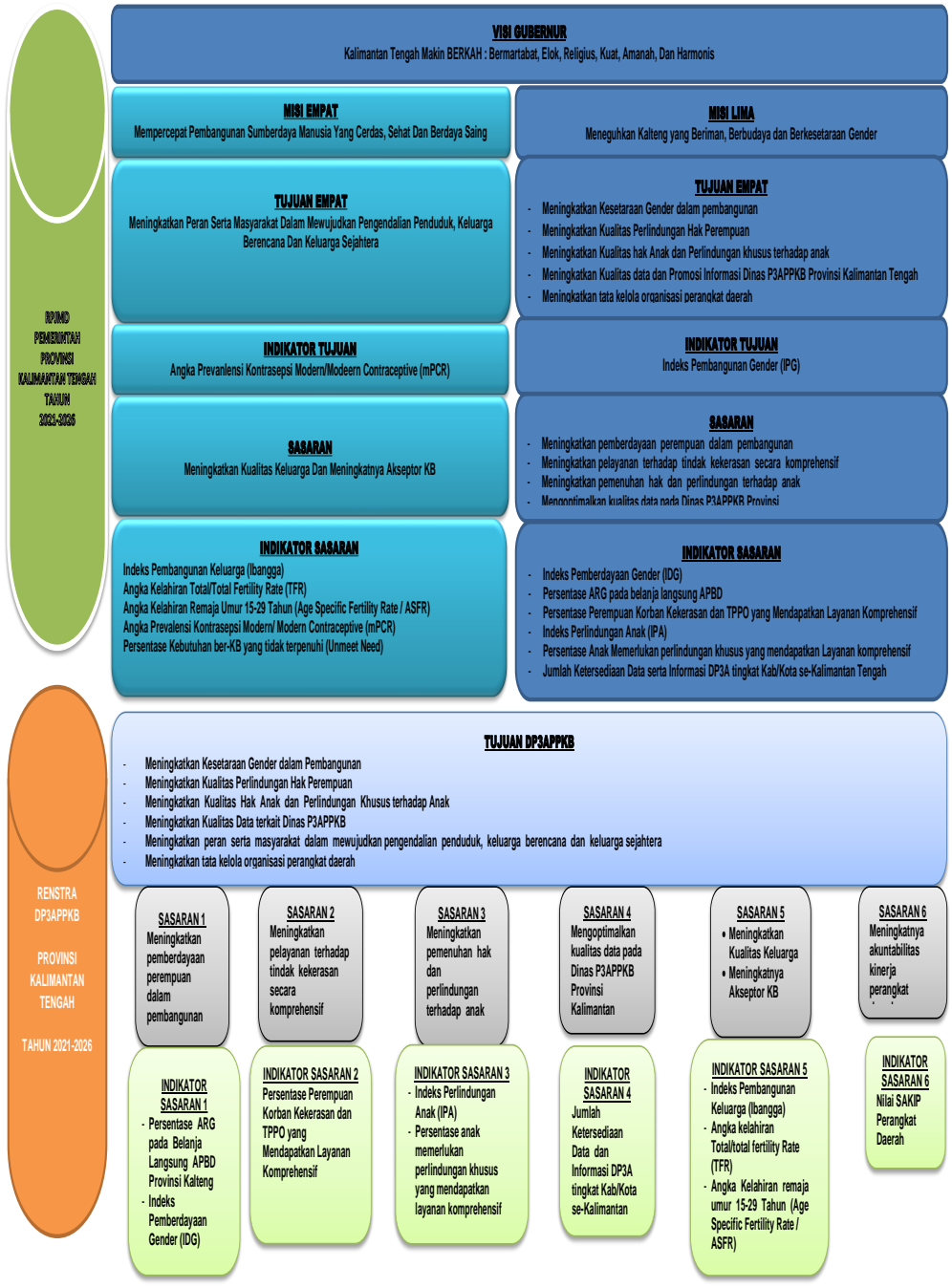
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Meningkatkan Kualitas hak Anak dan Perlindungan khusus terhadap anak			Layanan Komprehensif						
	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	61,83	61,83	63,68	65,59	67,55	69,57	
				Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	50 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %

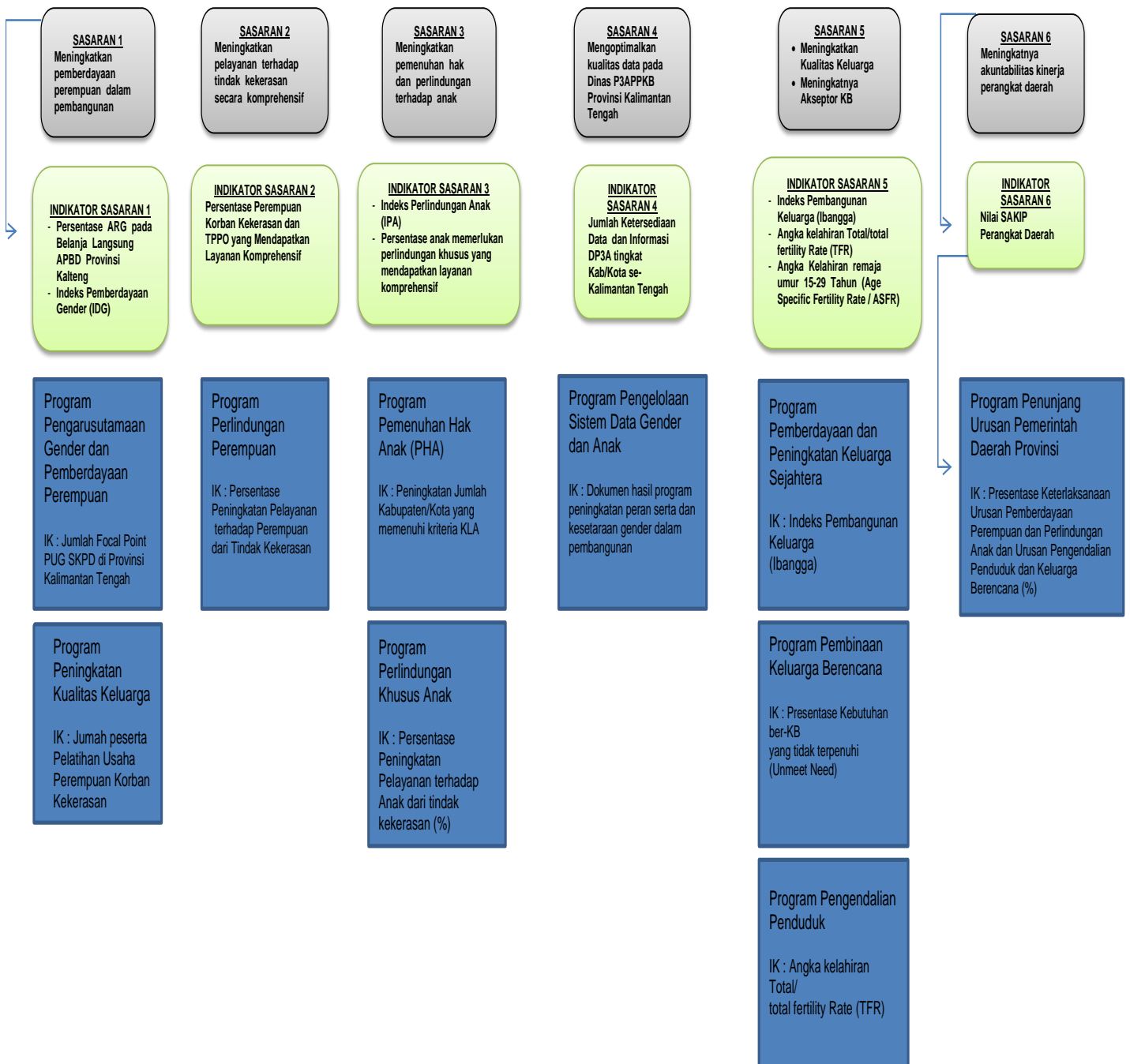
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Meningkatkan Kualitas data terkait Dinas P3APPKB									
		Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah		Jumlah Ketersediaan Data serta Informasi DP3A tingkat Kab/Kota se-Kalimantan Tengah	6 Kab/Kota	6 Kab/Kota	8 Kab/Kota	10 Kab/Kota	12 Kab/Kota	14 Kab/Kota
5	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mPCR)		73,23	73,23	73,68	74,26	74,26	74,26

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan kualitas keluarga		Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	60,32	60,32	62,44	64,55	64,55	64,55
				Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2,10	2,10	2,06	2,00	1,96	1,96
				Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	21	21	20	18	16	16
		Meningkatnya akseptor KB		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern	73,23	73,23	73,68	74,26	74,26	74,26

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Contraceptive (mPCR)						
				Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	5,36 %	5,36 %	5,18 %	5 %	5,01 %	5,01 %
6	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat		70	70	74	77	80	85
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	BB

IV. CASCADING KINERJA (KETERHUBUNGAN DENGAN RPJMD 2021 – 2026)





Eselon 2

SASARAN 1
Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan

INDIKATOR SASARAN 1

- Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng
- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Eselon 3

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
IK : Jumlah Focal Point PUG SKPD di provinsi Kalimantan Tengah

- **Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**
IK : Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
- **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**
IK : Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
- **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**
IK : Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

Program Peningkatan Kualitas Keluarga
IK : Jumlah Peserta Pelatihan Usaha Perempuan Korban Kekerasan

- **Peningkatan Kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak kewenangan Provinsi**
IK : Jumlah kab/kota yang membentuk forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)
- **Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya lintas daerah Kabupaten/Kota**
IK : Dokumen hasil pelaksanaan pelayanan baginkeluarga dalam mewujudkan KG lintas prov dan kab/kota

Sub Koordinator

Meningkatnya jumlah pelaku usaha industri rumahan pada perempuan
IK : Jumlah Perempuan Industri Rumahan (Pemula) yang mengikuti Sosialisasi

Terlaksananya Bimbingan Usaha Bagi Perempuan
IK : Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan usaha

Terlaksananya Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam politik, hukum, Sosial dan ekonomi
IK : Tersusunnya Laporan Hasil Kegiatan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam politik, hukum, social dan ekonomi

Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten/kota
IK : Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PUG di Kabupaten / Kota

Terlaksananya Perumusan kebijakan pelaksanaan PUG di SKPD
IK : Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)

Terlaksananya Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG
IK : Jumlah Peserta yang mengikuti pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG

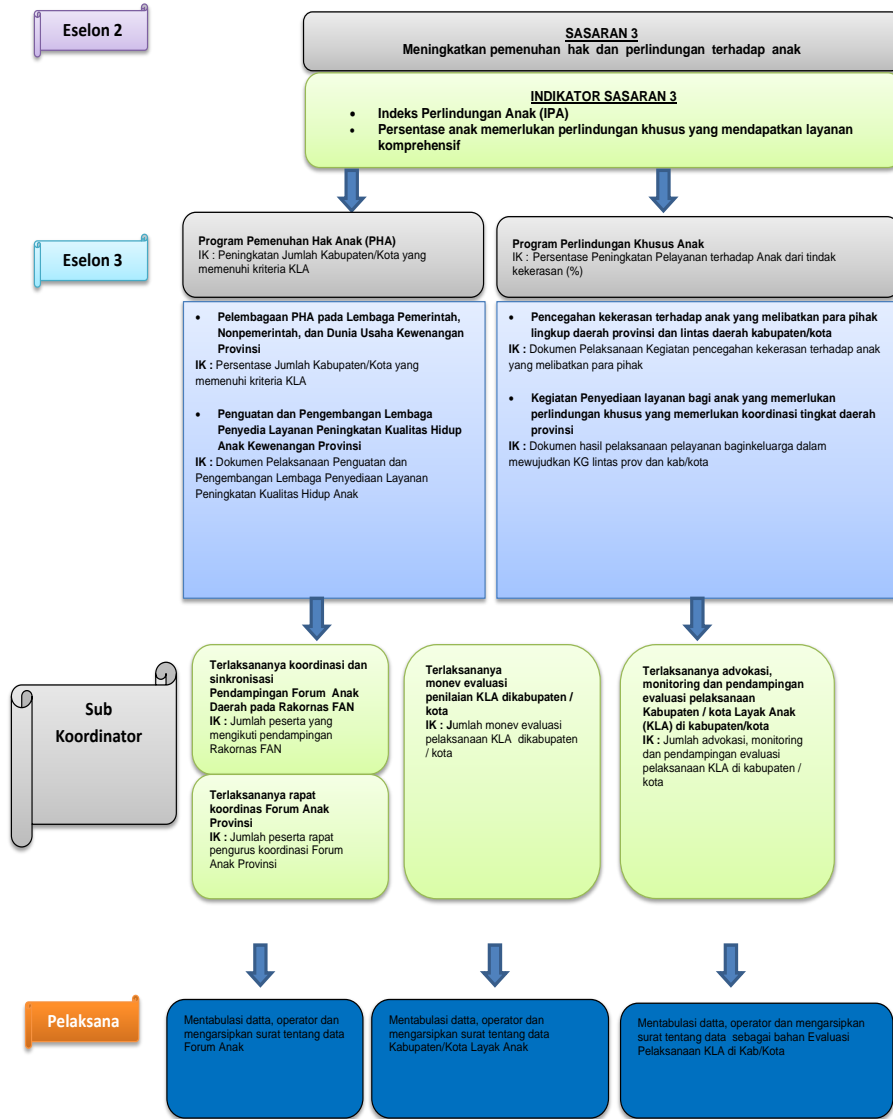
Meningkatnya Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam mendukung PUG
IK : 1. Jumlah Lembaga Adat di Provinsi Kalimantan Tengah yang mendukung PUG, Tersusunnya Laporan hasil kegiatan Pemberdayaan Perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan provinsi

Pelaksana

Jumlah data yang dikelola sebagai bahan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi terkait penguatan kelembagaan gender dan operator program

Jumlah data yang dikelola sesuai dengan format sebagai bahan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan PUG dan PPRG dan operator program

Jumlah data yang dikelola sesuai dengan format sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, social dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan provinsi dan operator program



Eselon 2

SASARAN 2
Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif

INDIKATOR SASARAN 1
Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif

Eselon 3

Program Perlindungan Perempuan
IK : Persentase Peningkatan Pelayanan Terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan

- Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

IK : Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak

- Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten

IK : Dokumen Pelaksanaan Layanan korban kekerasan

- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

IK : Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan

Sub Koordinator

Tertersedianya sosialisasi kekerasan terhadap perempuan serta TPPO
IK : Jumlah SDM yang memahami tentang kekerasan terhadap perempuan dan TPPO

Meningkatnya jumlah perempuan korban kekerasan yang diberikan pelatihan keterampilan
IK : Jumlah perempuan korban kekerasan yang diberikan pelatihan keterampilan

Terkoordinirnya pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan
IK : Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi

Tertersedianya sosialisasi kebijakan perlindungan hak perempuan dalam situasi darurat
IK : Jumlah SDM yang memahami tentang perlindungan hak perempuan dalam situasi darurat

Meningkatnya jumlah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang diberikan advokasi Posyandu dalam rangka Gerakan Sayang Ibu (GSI)
IK : Jumlah kabupaten/kota yang diberikan advokasi

Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan tenaga pendamping korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
IK : Jumlah peserta pelatihan tenaga pendamping korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

Tertersedianya advokasi pembangunan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)
IK : Tertersedianya advokasi pembangunan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Tertersedianya Lomba Gerakan Sayang Ibu (GSI) di Provinsi Kalimantan Tengah
IK : Jumlah kabupaten/kota yang mengikuti lomba Gerakan Sayang Ibu (GSI) di Provinsi Kalimantan Tengah

Tersedianya kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus
IK : Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan bantuan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat

Pelaksana

Mentabulasi data, operator dan mengarsipkan surat tentang data kekerasan terhadap perempuan serta TPPO

Mentabulasi data, operator dan mengarsipkan surat tentang data Jumlah Perempuan yang diberikan pelatihan dan jumlah Kabupaten/kota yang ikut serta dalam kegiatan GSI.

Mentabulasi data, operator dan mengarsipkan surat tentang data kebijakan perlindungan Perempuan dan surat menyurat

Eselon 2

SASARAN 4
Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan

INDIKATOR SASARAN 4
Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi DP3A tingkat Kab/Kota se-Kalimantan Tengah

Eselon 3

Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
IK : Dokumen hasil program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

- Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi

IK : Dokumen pelaksanaan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi

Sub Koordinator

Meningkatnya Peserta Rapat Koordinasi Data Gender dan Anak
IK : Jumlah Peserta Rapat Koordinasi

Terbentuknya Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak di Kabupaten/Kota
IK : Persentase Terbentuknya Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak di Kabupaten/Kota

Terlaksananya Publikasi dan Informasi melalui Media Cetak dan Elektronik
IK : 1. Jumlah Publikasi melalui Media Cetak, 2. Jumlah Publikasi melalui Media Elektronik

Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik / Website pada Perangkat Daerah
IK : Jumlah Kegiatan Pengembangan Website

Terlaksananya Penyediaan Informasi Bagi Masyarakat atas Layanan Perangkat Daerah
IK : Terlaksananya Pameran dan Pawai Pembangunan

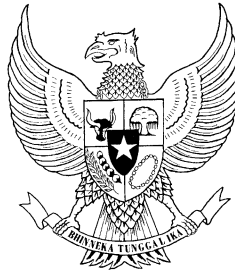
Pelaksana

Mentabulasi data, operator dan mengarsipkan surat tentang data Gender Dan Anak

Mentabulasi data, operator dan mengarsipkan surat tentang Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak di Kabupaten/Kota

Menyiapkan data dan sebagai operator publikasi melalui media cetak dan elektronik, serta terlaksananya Pameran dan Pawai Pembangunan

V. **KEBERHASILAN YANG DICAPAI DINAS P3APPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023**



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM *HAPAKAT* USAHA *BAWI LEWU*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR

KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan dan pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), antara lain perlu kebijakan untuk desa di Provinsi Kalimantan Tengah yang mengatur tentang implementasi dan upaya peningkatan perempuan wirausaha di desa;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024, Pemerintah Daerah berperan dalam menyinergikan kebijakan dan program pengembangan kewirausahaan nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program *Hapakat* Usaha *Bawi Lewu*;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM *HAPAKAT USAHA BAWI LEWU*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. *Hapakat* adalah bekerja bersama-sama atau bergotong royong (kebersamaan/*kapakat*) semua komponen masyarakat serta terbuka dengan tidak membedakan agama, suku, jenis kelamin dan warna kulit dalam menentukan dan mengerjakan sesuatu atau mewujudkan sesuatu tujuan.
6. *Bawi Lewu* adalah perempuan yang berdomisili di desa.
7. Program *Hapakat Usaha Bawi Lewu* yang selanjutnya dapat disebut Program adalah program yang mengupayakan secara bersama-sama/bekerja sama oleh semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun lembaga pemerintahan desa, lembaga keuangan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi masyarakat adat secara langsung terlibat melalui program dan kegiatan masing-masing dan atau kerjasama dalam rangka mengembangkan kewirausahaan perempuan di desa.
8. Desa atau yang disebut dengan nama *Lewu* adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak adalah Desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak Anak dalam tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat

- Desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan Indonesia
10. Wirausaha adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan.
 11. Wirausaha Pemula adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang ingin berwirausaha dan merintis usaha.
 12. Wirausaha Baru adalah wirausaha pemula yang telah mendaftarkan dan telah mengikuti kegiatan pengembangan kewirausahaan terpadu dalam upaya peningkatan omzet, aset dan/atau jumlah tenaga kerja.
 13. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan/atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan/atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.
 14. Kewirausahaan Perempuan adalah perempuan yang memikirkan suatu usaha, mempraktikkannya, mengatur dan menggabungkan faktor-faktor produksi, menjalankan usaha tersebut dan mengambil risiko serta menangani ketidakpastian ekonomi yang terlibat dalam menjalankannya.
 15. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat BDT adalah pemutakhiran data dasar berbasis keluarga sasaran yang digunakan untuk program peningkatan kesejahteraan sosial.

Pasal 2

Program *Hapakat Usaha Bawi Lewu* diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. Gotong royong, artinya semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun lembaga pemerintahan desa, lembaga keuangan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi masyarakat adat secara langsung terlibat melalui program dan kegiatan masing-masing dan atau kerjasama membantu kewirausahaan perempuan di desa.
- b. Non Diskriminasi, artinya setiap orang setara, memiliki hak dan diperlakukan sama.
- c. Penghargaan terhadap pandangan perempuan, artinya semua pihak mengakui dan menghargai pandangan perempuan karena pandangan perempuan yang lahir dan terbentuk dari pengalaman hidupnya sehari-hari adalah pengetahuan yang nilainya setara dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal. Semua pihak terutama Desa mengakomodasi dan menyediakan ruang bagi pengetahuan, kreatifitas dan usaha perempuan dalam pembangunan desa secara umum dan secara khusus bagi keluarga.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai:

- a. dasar pelaksanaan Program *Hapakat Usaha Bawi Lewu*; dan
- b. panduan bagi Pemerintah Provinsi dan semua unsur pelaku Pembangunan di Desa dalam mendukung Program Prioritas Presiden Republik Indonesia untuk Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yakni adanya peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender.

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas perempuan wirausaha di desa yang mampu mengembangkan usahanya dengan percaya diri, mandiri, dapat mengontrol hasil usahanya;
- b. meningkatkan peran serta kaum perempuan di desa dalam peningkatan pendapatan/perekonomian keluarga; dan c. meningkatkan perekonomian di perdesaan.

BAB II

ARAH, SASARAN, LANGKAH DAN PENYELENGGARA PROGRAM *HAPAKAT* USAHA *BAWI LEWU*

Pasal 5

Arah Program *Hapakat* Usaha *Bawi Lewu* memperkuat:

- a. kewirausahaan perempuan diutamakan kepada perempuan rentan seperti perempuan kepala keluarga, perempuan penyintas kekerasan dan perempuan penyintas bencana, perempuan yang memiliki potensi dan Perempuan rentan lainnya yang tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang memadai untuk mencukupi kebutuhan keluarganya; dan
- b. memperkuat keahlian dan pengetahuan Perempuan dalam pengembangan kewirausahaan.

Pasal 6

- (1) Sasaran pengembangan kewirausahaan perempuan adalah terwujudnya Wirausaha Pemula yang mampu mengembangkan dan meningkatkan perekonomian desa.
- (2) Selain Wirausaha Pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran dapat ditujukan bagi Wirausaha Baru Perorangan dan/atau Kelompok.
- (3) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berstatus:
 - a. keluarga miskin berdasarkan BDT; dan/atau
 - b. penyandang disabilitas.

Pasal 7

Langkah-langkah kebijakan Program *Hapakat* Usaha *Bawi Lewu*, meliputi:

- a. pendataan perempuan rentan, dan perempuan potensial di desa yang memiliki usaha dan berminat membuka usaha;
- b. pemetaan kondisi ketrampilan wirausaha *Bawi Lewu* dan potensi sumber daya dari lingkungan sekitarnya;
- c. peninjauan kebutuhan ketrampilan wirausaha yang dibutuhkan *Bawi Lewu*;
- d. pemetaan pihak-pihak yang dapat mendukung pendanaan pelatihan ketrampilan wirausaha;
- e. pemetaan pihak-pihak yang dapat melatih kewirausahaan;
- f. pelaksanaan pelatihan kewirausahaan berprespektif gender baik secara mandiri maupun dengan mengikuti pelatihan oleh pihak lain;
- g. pendampingan usaha;

- h. pengembangan kerjasama lintas pemangku kepentingan pengembangan kewirausahaan di Desa untuk memperkuat pasok, termasuk dengan pengusaha dan korporasi;
- i. peningkatan inkubasi bisnis, alokasi anggaran dan bantuan sosial khusus usaha kecil dan menengah perempuan dalam meningkatkan kesetaraan gender dan pengurangan kemiskinan;
- j. kemudahan mengakses kepada permodalan dan insentif pemerintah;
- k. memasifkan program bimbingan dan pelatihan literasi digital dan keuangan;
- l. Lembaga keuangan dapat menciptakan produk-produk yang disesuaikan dengan kebutuhan, produk keuangan dengan syarat yang mudah dan agunan yang *flexible*; dan
- m. kampanye dan gerakan penggunaan produk lokal termasuk di dalam lembaga pemerintahan.

Pasal 8

(1) Perangkat Daerah Penyelenggara Program di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri atas:

- a. Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan dan Perindustrian;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan;
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi Kelautan dan Perikanan;
 - h. Perangkat Daerah yang membidangi Tenaga Kerja;
 - i. Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata dan Kebudayaan; dan
 - j. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Program dapat diselenggarakan oleh:
- a. Perangkat Daerah lainnya sepanjang terkait dengan penyelenggaraan Kewirausahaan Perempuan; dan/atau
 - b. Lembaga dan/atau Pihak Lainnya.

(3) Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai koordinator Penyelenggara Program.

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM *HAPAKAT* USAHA *BAWI LEWU*

Bagian Kesatu Bentuk Kegiatan

Pasal 9

- (1) Program *Hapakat* Usaha *Bawi Lewu* bagi Wirausaha Pemula dan/atau Wirausaha Baru yang sudah terbentuk meliputi kegiatan:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan wirausaha;
 - c. perizinan;
 - d. pemasaran;
 - e. pelaporan keuangan; dan/atau f. fasilitasi permodalan.
- (2) Petunjuk pelaksanaan setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Standar Operasional Prosedur

Pasal 10

Standar Operasional Prosedur pengelolaan Program *Hapakat* Usaha *Bawi Lewu* disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB IV PENYEDIAAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA KEWIRAUSAHAAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah Penyelenggara Program dapat menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi Peserta Program dalam mengembangkan usahanya.
- (2) Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. optimalisasi pemanfaatan fasilitas sarana yang telah dimiliki; dan/atau
 - b. pemberian bantuan sarana berupa alat kerja atau sarana lainnya sebagai pendukung peserta Program dalam mengembangkan usahanya.

Pasal 12

Pemberian bantuan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan melalui mekanisme hibah, bantuan sosial dan/atau bantuan lainnya dalam bentuk barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBENTUKAN JEJARING DAN PASAR BERSAMA

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah Penyelenggara Program bersama dengan pemangku kepentingan memfasilitasi pembentukan jejaring dan pasar bersama dari Peserta Program.
- (2) Pembentukan jejaring dan pasar bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. fasilitasi kurasi produk dan kemasan;
 - b. penyusunan katalog barang dan jasa Peserta Program;
 - c. pemanfaatan hasil produksi Peserta Program di masing-masing wilayah/Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. pengenalan produk atau promosi;
 - e. sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta kemudahan pengurusan sertifikat halal dan hak kekayaan intelektual;
 - f. penyelenggaraan pameran Wirausaha baik lokal, nasional maupun internasional;
 - g. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, daring dan media luar ruang;
 - h. gelar karya atau demonstrasi produk; dan/atau
 - i. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Kewirausahaan.
- (3) Kegiatan pembentukan jejaring dan pasar bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan dikoordinir oleh Asisten Sekretaris Daerah

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah Penyelenggara Program dapat membangun, mengembangkan dan mengelola sistem informasi penyelenggaraan Program sesuai dengan lingkup tugasnya dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pengembangan kegiatan kewirausahaan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah mengintegrasikan sistem informasi penyelenggaraan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam sistem digital dalam rangka menciptakan keterpaduan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi penyelenggaraan Program.

Pasal 15

- (1) Seluruh Perangkat Daerah, BUMD dan Dunia Usaha yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah memprioritaskan penggunaan produk hasil Peserta Program dalam setiap kegiatan kerja yang dilaksanakan berdasarkan wilayah kerja masing-masing.
- (2) Penggunaan produk hasil Peserta Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Kerja sama Perangkat Daerah Penyelenggara Program dengan Lembaga dan/atau Pihak Lainnya dalam kegiatan sebagai berikut:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan;
 - c. pemasaran;
 - d. pelaporan keuangan;
 - e. permodalan;
 - f. pembentukan jejaring dan pasar bersama; atau
 - g. penyediaan sarana dan prasarana kewirausahaan.
- (2) Kerja sama Lembaga dan/atau Pihak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program dibentuk Tim yang berkedudukan di bawah Sekretaris Daerah yang bertugas dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program dilaporkan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Susunan keanggotaan, tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan supervisi pengembangan kewirausahaan Perempuan di desa dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Bupati/ Walikota, Desa dan/atau institusi/Lembaga yang berperan aktif dalam Program *Hapakat Usaha Bawi Lewu*.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat hari-hari besar nasional dan/atau Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Tengah.
 - (4) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan dalam penyelenggaraan Program *Hapakat Usaha Bawi Lewu* bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 Desember 2023
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

PROVINSI KAL


Telah ditandatangani secara elektronik oleh:



SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 7
Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:



NURYAKIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 53

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikat (BSrE)
Badan SIBER dan Sandi Negara

1 **PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MERAIH PENGHARGAAN APE TH 2023 DENGAN KATEGORI MADYA**



2 **KABUPATEN KAPUAS MERAIH PENGHARGAAN APE TH 2023 DENGAN KATEGORI MADYA**



3 **KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT MERAIH PENGHARGAAN APE TH 2023 DENGAN KATEGORI PRATAMA**



4 **KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR MERAIH PENGHARGAAN APE TH 2023 DENGAN KATEGORI PRATAMA**



Dokumentasi Penerima Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2023

Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kalimantan Tengah Tahun 2023

1. Kota Palangka Raya Meraih Predikat Madya



2. Kabupaten Pulang Pisau Meraih Predikat Madya



3. Kabupaten Kotawaringin Barat Meraih Predikat Madya



4. Kabupaten Kapuas Meraih Predikat Pratama



5. Kabupaten Katingan Meraih Predikat Pratama



6. Kabupaten Kotawaringin Timur Meraih Predikat Pratama



7. Kabupaten Sukamara Meraih Predikat Pratama



7 Kabupaten/Kota Peraih Penghargaan KLA Predikat Pratama (4 Kabupaten) dan Predikat Madya (2 Kabupaten; 1 Kota)



-32-

CAPAIAN GERAKAN SAYANG IBU KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023



Penyerahan Penghargaan Kategori Informatif Peringkat III Tahun 2023
Award Presentation of Rating Informative Category Rank III in 2023

Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah mendapat Peringkat ke 5 Dalam Kategori Informatif dengan nilai 94,85 dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik di Kalimantan Tengah Tahun 2023



KOMITMEN

Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga dengan HAPAKAT Membangun Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023. Bersama Lintas Sektor dan Perbangkan (OJK, Bank Indonesia dan Bank Kalteng)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan R. T. A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp / Faks. (0536) 3221716 email: sekret@kalteng.go.id

KESEPAKATAN BERSAMA
HASIL FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PEMBERDAYAAN
KEWIRAUSAHAAN PEREMPUAN DALAM MEWUJUDKAN
KETAHANAN KELUARGA DENGAN HAPAKAT MEMBANGUN DESA
RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK DI PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, sesuai dengan tugas, fungsi dan bidang masing-masing berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* **Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga dengan HAPAKAT Membangun Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023** bersepakat untuk:

1. Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi perempuan.
2. Meningkatkan Kapasitas SDM bagi perempuan dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam kewirausahaan.
3. Membangun jaringan dan koneksi yang memungkinkan perempuan berinteraksi dengan sesama wirausaha, pemimpin bisnis, dan sumber daya potensial.
4. Memfasilitasi akses perempuan ke sumber daya seperti infrastruktur, teknologi, dan akses pasar.
5. Pemetaan data perempuan, termasuk yang melakukan aktifitas ekonomi atau kewirausahaan.
6. Melakukan bimbingan, monitoring, dan evaluasi terjadwal berdasarkan TUPOKSI dan/atau bersama-sama terhadap usaha yang dijadwalkan.



VII. SURAT REWARD TERHADAP KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR

REWARD TERHADAP KINERJA ESELON III DINAS P3APPKB PROVINSI KALTENG



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Alamat: Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :dp3akkb.kalteng@gmail.com
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PENGHARGAAN Nomor:050/78/SEKRE/DP3APPKB

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pemerdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah memberikan penghargaan kepada :

Nama : SUYANTO,A.Ks,M.Si
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemerdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

TELAH BERHASIL

Sehubungan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Pemerdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, yaitu:

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Program	Jumlah Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya akuntabilitas kiberja perangkat daerah	Nilai SAKIP Peringkat Daerah	Skor	BB	A	112,6 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.272.169.181

Maka dengan ini memberikan penghargaan terhadap keberhasilan kinerja yang telah dicapai. Teruslah berkarya dan berinovasi dalam keberhasilan Visi dan Misi Dinas P3APPKB menuju Kalimantan Tengah "BERKAH".
Demikian disampaikan atas keberhasilannya, diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
dr.LINAE VICTORIA ADEN M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Alamat: Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :dp3akkb.kalteng@gmail.com
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PENGHARGAAN Nomor:050/78/SEKRE/DP3APPKB

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pemerdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah memberikan penghargaan kepada :

Nama : Mariana, S.E
Jabatan : Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemerdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

TELAH BERHASIL

Sehubungan dengan pencapaian indicator kinerja sasaran Dinas Pemerdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, yaitu:

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Progam	Jumlah Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	81,92	81,98	100,07	Program Pengarus utamaan Gender Dan Pemberd ayaan Perempu an	1.074.393.501

Maka dengan ini memberikan penghargaan terhadap keberhasilan kinerja yang telah dicapai. Teruslah berkarya dan berinovasi dalam keberhasilan Visi dan Misi Dinas P3APPKB menuju Kalimantan Tengah "BERKAH".
Demikian disampaikan atas keberhasilannya, diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
dr.LINAE VICTORIA ADEN M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Alamat: Jl. Brigjen Katamsa No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :dp3akkb.kalteng@gmail.com
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PENGHARGAAN
Nomor:050/DP/SEKRE/DP3APPKB

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah memberikan penghargaan kepada :

Nama : YUYUN WAHYUNI SE., M.Si
Jabatan : Pih.Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

TELAH BERHASIL

Sehubungan dengan pencapaian indicator kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, yaitu:

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Program	Jumlah Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	55	55	100%	Program Perlindungan Khusus Anak	589.622.435

Maka dengan ini memberikan penghargaan terhadap keberhasilan kinerja yang telah dicapai. Teruslah berkarya dan berinovasi dalam keberhasilan Visi dan Misi Dinas P3APPKB menuju Kalimantan Tengah "BERKAH".

Demikian disampaikan atas keberhasilannya, diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Dr. LINA E. VICTORIA ADEN M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19560717 198903 2 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Alamat: Jl. Brigjen Katamsa No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :dp3akkb.kalteng@gmail.com
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PENGHARGAAN
Nomor:050/DP/SEKRE/DP3APPKB

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah memberikan penghargaan kepada :

Nama : Ir. EVANGELIS, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

TELAH BERHASIL

Sehubungan dengan pencapaian indicator kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, yaitu:

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Program	Jumlah Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan secara komprehensif	Persen	87,5	114,28	111,57	Program Perlindungan Perempuan	1.029.521.131

Maka dengan ini memberikan penghargaan terhadap keberhasilan kinerja yang telah dicapai. Teruslah berkarya dan berinovasi dalam keberhasilan Visi dan Misi Dinas P3APPKB menuju Kalimantan Tengah "BERKAH".

Demikian disampaikan atas keberhasilannya, diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Dr. LINA E. VICTORIA ADEN M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19560717 198903 2 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
 Alamat: Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :dp3akkb.kalteng@gmail.com
 PALANGKA RAYA 73112

SURAT PENGHARGAAN

Nomor:050/ /SEKRE/DP3APPKB

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah memberikan penghargaan kepada :

Nama : **YUYUN WAHYUNI SE., M.Si**
 Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

TELAH BERHASIL

Sehubungan dengan pencapaian indicator kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, yaitu:

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Program	Jumlah Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Persen	62,44	54,25	86,88	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.473.155.100
	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate/TFR per WUS usia 15-49 Tahun	2,06	2,06	89,95		

Maka dengan ini memberikan penghargaan terhadap keberhasilan kinerja yang telah dicapai. Teruslah berkarya dan berinovasi dalam keberhasilan Visi dan Misi Dinas P3APPKB menuju Kalimantan Tengah "BERKAH".
 Demikian disampaikan atas keberhasilannya, diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS P3APPKB
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LINAE VICTORIA ADEN M.M.Kes
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19860717 199903 2 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
 Alamat: Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :dp3akkb.kalteng@gmail.com
 PALANGKA RAYA 73112

SURAT PENGHARGAAN

Nomor:050/ /SEKRE/DP3APPKB

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah memberikan penghargaan kepada :

Nama : **JUMRAH, S.ST., M.AP**
 Jabatan : Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

TELAH BERHASIL

Sehubungan dengan pencapaian indicator kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, yaitu:

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Program	Jumlah Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan secara komprehensif	Persen	87,5	114,28	111,57	1.Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	351.638.523
Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	55	55	100%	2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	570.360.839

Maka dengan ini memberikan penghargaan terhadap keberhasilan kinerja yang telah dicapai. Teruslah berkarya dan berinovasi dalam keberhasilan Visi dan Misi Dinas P3APPKB menuju Kalimantan Tengah "BERKAH".
 Demikian disampaikan atas keberhasilannya, diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS P3APPKB
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LINAE VICTORIA ADEN M.M.Kes
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19860717 199903 2 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
I N S P E K T O R A T

Jalan Yos Sudarso No.06, Telp./Fax. (0536) 3222359 Kode Pos : 73112
Email : inspektorat@kalteng.go.id Website : inspektorat.kalteng.go.id
PALANGKA RAYA

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)

**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2022**

NOMOR : 700/ 516 /LHE/2023/INSP
TANGGAL : 5 MEI 2023



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
INSPEKTORAT

Jalan Yos Sudarso Nomor 06 Palangka Raya 73112
Telp./Fax (0536) 3222359

**LAPORAN HASIL EVALUASI
(LHE)**

PADA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 700/516/LHE/2023/INSP

TANGGAL : 5 MEI 2023

TERHADAP : AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

MASA EVALUASI : KINERJA TAHUN 2022

A. Pendahuluan

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- e. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.
- g. Keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 700/7/SEKRE-1/INSP tanggal 27 Maret 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

- h. Surat Perintah Tugas dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah a.n. Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 700/65/SPT/IRBAN-2/INSP tanggal 5 April 2023.

2. Latar Belakang Evaluasi

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil maka perlu dilakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi meliputi 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022, merupakan dokumen yang dievaluasi serta dokumen lainnya seperti Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

- a. *Checklist* Pengumpulan Data;
- b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana;
- c. Observasi;
- d. Studi Dokumentasi.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Sebagai salah satu unit organisasi perangkat kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutaman gender dan pemberdayaan perempuan;
- e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;

- f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- g. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
- h. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan peningkatan kualitas hidup keluarga;
- i. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- j. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;
- k. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggung jawab.

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% Capaian tahun 2022
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,90	82,08	100,23
	Persentase ARG pada pelanja Langsung APBD	3,43 %	3,38%	98,54
Meningkatnya pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	108,36%	103,56

Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	61,83	61,83	100
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	50 %	50%	100
Megoptimalkan kualitas Data pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah ketersediaan Data serta Informasi DP3APPKB tingkat Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah	6 Kab/Kota	9 Kab/Kota	150
Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	60,32 %	54,01%	89,53
	Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2,10	2,24	93,75

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

- a. Perencanaan Kinerja

Program kegiatan dalam mendukung indikator telah menjadi penyebab langsung terwujudnya tujuan sasaran organisasi.
- b. Pengukuran Kinerja
 - 1) Telah menerapkan target kinerja yang diperjanjikan pada tingkat eselon II, III, dan IV untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kinerja secara menyeluruh dengan disertai dengan melakukan monitoring periodik sebagai dasar pemberian *reward dan punishment*.
 - 2) Teknologi informasi sebagai sarana untuk mengukur kinerja dalam rangka efisiensi, keandalan data dan akuntabilitas pengukuran dalam <https://dp3appkb.kalteng.go.id/>
- c. Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja telah menyajikan informasi mengenai analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya (keuangan/manusia/perlengkapan) dan hambatan/kendala dalam pencapaian target serta rencana tindak lanjut yang relevan untuk mengatasi hambatan/kendala yang terjadi;

- d. Evaluasi Internal
Evaluasi atas program dan kegiatan telah dilaksanakan dan dilaporkan per triwulan
- e. Pencapaian sasaran / kinerja organisasi
Indikator dan target kinerja telah sesuai berdasarkan UUD 23 Tahun 2014 Fungsi Dinas P3APPKB adalah fungsi Koordinasi data – data sektoral.

B. Gambaran Hasil Evaluasi

1. Dari hasil evaluasi implementasi SAKIP tahun 2022 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh **nilai sebesar 80,75 dengan kategori A** (Memuaskan, terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon 4/pengawas/subkoordinator.

Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi 26,4 dari target idealnya 30,00, terdiri dari :

- 1) Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia, hasil evaluasi 6,00 dari target idealnya 6,00.
- 2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting), hasil evaluasi 7,6 dari target idealnya 9,00
- 3) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, hasil evaluasi 12,80 dari target idealnya 15,00

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi 21,90 dari target idealnya 30,00, terdiri dari :

- 1) Pengukuran Kinerja telah dilakukan, hasil evaluasi 5,2 dari target idealnya 6,00.

- 2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, hasil evaluasi 7,9 dari target idealnya 9,00.
- 4) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, namun belum menjadi dasar dalam penyesuaian tunjangan kinerja serta dalam penempatan jabatan baik struktural maupun fungsional. hasil evaluasi 8,8 dari target idealnya 15,00.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi 13,3 dari target idealnya 15,00, terdiri dari :

- 1) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja, hasil evaluasi 3,00 dari target idealnya 3,00.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, hasil evaluasi 4,00 dari target idealnya 4,50.
- 3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, hasil evaluasi 6,3 dari target idealnya 7,50.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi 19,15 dari target idealnya 25,00, terdiri dari :

- 1) Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan, hasil evaluasi 4,00 dari target idealnya 5,00.
- 2) Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai, hasil evaluasi 6,4 dari target evaluasi 7,50.
- 3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja, hasil evaluasi 8,75 dari target idealnya 12,50.

2. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah agar melakukan langkah-langkah perbaikan dengan menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian tunjangan kinerja aparatur serta dalam penempatan jabatan baik struktural maupun fungsional.

C. Penutup

1. Simpulan

Secara keseluruhan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk dapat lebih ditingkatkan capaiannya di waktu yang akan datang.

2. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Kami menghargai upaya seluruh jajaran dalam melaksanakan implementasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mengharapkan ada upaya-upaya perbaikan untuk dapat ditingkatkan secara berkelanjutan

Demikian hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat kami sampaikan sebagai bahan perbaikan manajemen kinerja.

INSPEKTUR DAERAH,

SARING, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP.19650510 198703 1 003

LAMPIRAN

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

TAHUN 2022

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2021	2022
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22,19	26,40
2	Pengukuran Kinerja	30,00	17,19	21,90
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,31	13,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,58	19,15
Nilai Akuntabilitas Kinerja			71,27	80,75
			BB	A

No	Catatan
1	Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
2	Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.

No	Rekomendasi
1	Pengukuran kinerja agar dijadikan dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
2	Pengukuran kinerja agar dijadikan dasar dalam penempatan jabatan baik struktural maupun fungsional

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan	Daftar Evidence	Keterangan
			Jawaban	Nilai			
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		26,4			
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00		6			
Kriteria:							
1	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah (Renstra)		Ya	2		Rencana Strategis (Renstra)	ada
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek (RKT)		Ya	2		Perangkat Daerah, Rencana	ada
3	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.		Ya	1		Kinerja Tahunan (RKT)	ada
4	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.		Ya	1			ada
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00		7,6			
Kriteria:							
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.		Ya	1			telah disyahkan
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.		Ya	1			https://dp3appkb.kalteng.go.id/
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.		BB	0,8			Renstra menyajikan isu strategis
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.		BB	0,8			telah dituangkan dalam IKU
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.		BB	0,8			indikator sebagian besar SMART
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).		BB	0,8			IKU berkelanjutan
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.		BB	0,8			sebagian besar target memenuhi kriteria dapat dicapai, menantang dan realistis
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).		BB	0,4			disajikan dlm pohon kinerja, selaras antara renstra dan renja
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).		BB	0,4			bukti dukung (ada pohon kinerja0
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.		BB	0,4			bukti dukung Renstra dan Renja (Pegawai/Fungsional)
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.		BB	0,4			
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00		12,8			
Kriteria:							
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.		BB	1,6			DPA/RKA
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.		BB	1,6			Pohon Kinerja, PK dan SKP, Rencana Aksi target tahun pd renstra dan renja dan lap monev triwulan
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.		BB	1,6			Lap trwulan
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.		BB	1,6			
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.		Ya	2			

6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.		Ya	2		
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.		BB	1,6		PK lap triwulan
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.		BB	0,8		SKP
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		21,9		
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00		5,2		
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.		Ya	2	SOP LAKIP	SOP LAKIP
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.		BB	1,6	Cara Perhitungan pada PK,	Cara Perhitungan pada PK, SOP
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.		BB	1,6		mekanisme pengumpulan data kinerja sudah andal sesuai kriteria yang ditetapkan
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan	9,00		7,9		
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (<i>Decision Maker</i>) dalam mengukur capaian kinerja.		A	1,35		
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.		B	1,05		
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.		BB	1,2		
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.		Ya	1,5		lap per triwulan
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.		BB	0,8		
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).		Ya	1		Aplikasi SIPD, Simda BMD, website OPD
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).		Ya	1		Aplikasi SIPD, Simda BMD, website OPD
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward	15,00		8,8		
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.		Tidak	0		
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.		Tidak	0		
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (<i>Refocusing</i>) Organisasi.		BB	1,6		
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.		BB	1,6		
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.		BB	1,6		
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.		BB	0,8		
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.		BB	0,8		
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.		BB	0,8		
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.		BB	0,8		
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.		BB	0,8		
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		13,3		
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00		3		

1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.		Ya	0,5			
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.		Ya	0,5			Laporan Kinerja disusun setiap tahun
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.		Ya	0,5			Web PPID, web esr.menpan.go.id
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direvisi.		Ya	0,5			
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.		Ya	0,5			Web PPID, web esr.menpan.go.id
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.		Ya	0,5			14-Feb-23
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya	4,50		4			
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.		BB	0,4			
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.		A	0,45			disajikan pada Bab 3 LKIP
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.		A	0,45			disajikan pada Bab 3 LKIP
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.		A	0,45			disajikan pada Bab 3 LKIP
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.		A	0,45			disajikan pada Bab 3 LKIP
	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level daerah/nasional (<i>Benchmark Kinerja</i>).		A	0,45			disajikan pada Bab 3 LKIP
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.		A	0,45			disajikan pada Bab 3 LKIP
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.		A	0,45			disajikan pada Bab 3 LKIP
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).		A	0,45			disajikan pada Bab 3 LKIP
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50		6,3			
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).		Ya	1,5			
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.		BB	0,8			
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.		BB	0,8			
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.		BB	0,8			
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.		BB	0,8			
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.		BB	0,8			
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.		BB	0,8			
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		19,15			
4.a	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00		4			
1	Telah dilakukan evaluasi dalam rangka pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya		BB	1,6			

2	Telah dilaksanakan Evaluasi Internal terhadap seluruh program unit kerja/perangkat daerah.		BB	1,6			
3	Hasil evaluasi pemantauan kemajuan kinerja dan evaluasi program sudah dikomunikasikan dengan pihak yang berkepentingan		BB	0,8			
4.b	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50		6,4			
1	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh Pejabat/SDM yang berkompeten.		Ya	2			
2	Evaluasi dalam rangka pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan pencapaian kinerja.		BB	1,6			
3	Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program.		BB	1,6			
4	Hasil evaluasi pemantauan kemajuan kinerja dan evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan.		BB	1,2			
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50		8,75			
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.		B	1,75			
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja		B	1,75			
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.		B	1,75			
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.		B	1,75			
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.		B	1,75			

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah agar melakukan Langkah-langkah perbaikan dengan menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian tunjangan kinerja aparatur serta dalam penempatan jabatan baik struktural maupun fungsional	<p>1. Kewenangan Kepala Dinas P3APPKB dalam Pengukuran kinerja dilakukan pengawasan melekat dan berjenjang dengan menerapkan SPAN Of Control yang dilakukan secara berkala. Yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan penilaian kinerja pada SKP secara berjenjang - Reward dan Punisment tidak dalam bentuk Uang tapi dalam bentuk sertifikat untuk pejabat eselon III untuk keberhasilan capaian Kinerja yang dilampirkan setiap tahun dalam laporan SAKIP <p>2. Bukan kewenangan Kepala OPD dalam pemberian tunjangan kinerja ASN</p> <p>3. Bukan Kewenangan Kepala OPD Dalam penempatan jabatan baik struktural maupun fungsional, Kepala OPD hanya memberikan rekomendasi ke Sekretaris Daerah dan BKD Provinsi Kalteng sebagai masukan berdasarkan capaian Kinerja.</p>	<p>1. Eselon III</p> <p>2. Eselon IV</p> <p>3. Pejabat Fungsional</p> <p>4. Pelaksana</p>	Tahun 2024	<p>1. Sekda Provinsi Kalteng</p> <p>2. BKD Provinsi Kalteng</p> <p>3. Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng</p>	Selesai

Palangka Raya, 5 Januari 2024


 Kepala Dinas P3APPKB
 Provinsi Kalimantan Tengah,
dr. LINA VICTORIA ADEN, M.M. Kes
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680717 199903 2 006

